



Nomor : 2909/PL6.3.1/SP/2018  
Hal : Izin Pengambilan Data

6 April 2018

**Yth. Kepala**  
**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31**  
**Jakarta Pusat 10210**

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik Alih Jenjang pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester IV (empat). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk mengumpulkan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Anita Sari	0616 4051 2533	4 AP E	Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
& Pembantu Direktur I,  
  
Carlos RS, S.T., M.T.  
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Akuntansi
2. Yang bersangkutan



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210  
Telepon 021-25549000 ext. 3912, Faksimili 021-57950288

Formulir Permintaan Informasi Publik  
(Rangkap Dua)

Nomor : ..... /PI/PIK/...../20.....

Tanggal :

Unit kerja tujuan :	
Cara Penyampaian : <b>E-mail</b>	
DATA PEMOHON INFORMASI	
Nama	Anita Sari
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat Rumah	Komp. Assalam 2 Jl. Politeknik Dalam, Bukit Lama, Palembang
Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa
Alamat Kantor	Politeknik Negeri Sriwijaya Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang
Email	anita.sari@gmail.com
NO. KTP	3277025711870011
NO. TELP	081285433455
JENIS PENGAJUAN PERMINTAAN INFORMASI	
Jenis Permintaan Informasi	<input checked="" type="checkbox"/> Pemeriksaan <input type="checkbox"/> Non Pemeriksaan
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 yang telah diaudit (542 LKPD 2016 Pemda Audited)
Tujuan Penggunaan Informasi	Penelitian Skripsi Progran Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya
Sumber Informasi**	<input checked="" type="checkbox"/> Pulbaket (Database) <input type="checkbox"/> Unit .....
Cara Memperoleh Informasi*	1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat <input checked="" type="radio"/> 2. Mendapat salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mengirimkan Informasi**	1. <input type="checkbox"/> Diambil Langsung 2. <input type="checkbox"/> Kurir 3. <input type="checkbox"/> Pos 4. <input checked="" type="checkbox"/> E-mail 5. <input type="checkbox"/> Faksimili
Tanggal Pengeluaran Informasi	

Informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari informasi ini setelah keluar dari Kantor BPK menjadi tanggung jawab pemohon/pengguna informasi

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

(Nama Jelas/NIP)

Pemohon Informasi

(ANITA SARI)

Keterangan :



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail: [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**SURAT KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Anita Sari

NIM : 061640512533

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Dr. Evada Dewata, S.E, M.Si., Ak., CA

NIP : 197806222003122001

Pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2018 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Skripsi.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.  
Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Rabu pukul 13.30 s.d selesai, tempat Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Skripsi.

Palembang, 12 Februari 2018

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Anita Sari  
NIM 061640512533

Dr. Evada Dewata, S.E, M.Si., Ak., CA  
NIP 197806222003122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E, M.Si., Ak., CA  
NIP 197806222003122001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website: [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail: [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**SURAT KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Anita Sari  
NIM : 061640512533

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP : 197902272002122003

Pada hari ini Rabu tanggal 21 Maret 2018 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Skripsi.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.  
Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Jumat pukul 13.30 s.d selesai, tempat Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Skripsi.

Palembang, 21 Maret 2018

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Anita Sari  
NIM 061640512533

Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 197902272002122003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 197806222003122001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

JalanSrijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website : [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Sari  
NIM : 061640512533  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Total Aset, Pendapatan Asli Daerah, Pengawasan Legislatif, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016  
Pembimbing I : Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12 Feb 2018	Pengajuan dan Acc judul	
2.	21 Mar 2018	Revisi proposal	
3.	28 Mar 2018	Revisi proposal	
4.	11 Apr 2018	Persetujuan proposal	
5.	18 Apr 2018	Revisi skripsi Bab 1	
6.	25 Apr 2018	Revisi skripsi Bab 2	
7.	2 Mei 2018	Revisi skripsi Bab 3	
8.	30 Mei 2018	Revisi skripsi Bab 4	
9.	6 Jun 2018	Revisi skripsi Bab 4-5	
10.	29 Jun 2018	Persetujuan skripsi	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA  
NIP 197806222003122001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website : [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Sari  
NIM : 061640512533  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Total Aset, Pendapatan Asli Daerah, Pengawasan Legislatif, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016  
Pembimbing II : Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak., CA

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	21 Mar 2018	Pengajuan dan Acc judul	Desi
2.	30 Mar 2018	Revisi proposal	Desi
3.	6 Apr 2018	Revisi proposal	Desi
4.	13 Apr 2018	Persetujuan proposal	Desi
5.	20 Apr 2018	Revisi skripsi Bab 1	Desi
6.	27 Apr 2018	Revisi skripsi Bab 2	Desi
7.	4 Mei 2018	Revisi skripsi Bab 3	Desi
8.	1 Jun 2018	Revisi skripsi Bab 4	Desi
9.	22 Jun 2018	Revisi skripsi Bab 4-5	Desi
10.	29 Jun 2018	Persetujuan skripsi	Desi

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA  
NIP 197806222003122001

**LAMPIRAN 5**  
**ITEM PENGUNGKAPAN WAJIB**

<b>NO.</b>	<b>ITEM PENGUNGKAPAN WAJIB BERDASARKAN SAP</b>
<b>PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan</b>	
1.	Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2.	Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3.	Kondisi persediaan
<b>PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi</b>	
4.	Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
5.	Jenis-jenis investasi (permanen dan non permanen);
6.	Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
7.	Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
8.	Investasi yang dinilai dengan nilai wajar;
9.	Perubahan pos investasi.
<b>PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap</b>	
10.	Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
11.	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode (penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, mutasi aset tetap lainnya);
12.	Informasi penyusutan (nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode);
13.	Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
14.	Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
15.	Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
16.	Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap; Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
17.	Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
18.	Tanggal efektif untuk menilai kembali aset tetap;
19.	Jika ada, nama penilai independen;
20.	Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
21.	Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
<b>PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	
22.	Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
23.	Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
24.	Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
25.	Uang muka kerja yang diberikan
26.	Retensi.

<b>PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban</b>	
27.	Daftar skedul utang;
28.	Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
29.	Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
30.	Bunga pinjaman yang tertuang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
31.	Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
32.	Perjanjian restrukturisasi utang;
33.	Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
34.	Biaya pinjaman.



*Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*



**LAMPIRAN 6**  
**TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**  
**DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
1	Prov. Aceh	15	44.12%
2	Kab. Aceh Barat	16	47.06%
3	Kab. Aceh Besar	14	41.18%
4	Kab. Aceh Selatan	12	35.29%
5	Kab. Aceh Tengah	15	44.12%
6	Kab. Aceh Timur	14	41.18%
7	Kab. Aceh Utara	14	41.18%
8	Kab. Bireuen	12	35.29%
9	Kab. Simeulue	16	47.06%
10	Kota Banda Aceh	13	38.24%
11	Kota Sabang	14	41.18%
12	Kota Langsa	11	32.35%
13	Kab. Gayo Lues	14	41.18%
14	Kab. Aceh Barat Daya	15	44.12%
15	Kab. Aceh Jaya	13	38.24%
16	Kab. Nagan Raya	12	35.29%
17	Kab. Aceh Tamiang	13	38.24%
18	Kab. Bener Meriah	13	38.24%
19	Kota Subulussalam	13	38.24%
20	Prov. Sumatera Utara	13	38.24%
21	Kab. Asahan	11	32.35%
22	Kab. Dairi	14	41.18%
23	Kab. Deli Serdang	13	38.24%
24	Kab. Karo	14	41.18%
25	Kab. Labuhanbatu	15	44.12%
26	Kab. Langkat	14	41.18%
27	Kab. Mandailing Natal	13	38.24%
28	Kab. Nias	13	38.24%
29	Kab. Simalungun	12	35.29%
30	Kab. Tapanuli Selatan	14	41.18%
31	Kab. Tapanuli Tengah	13	38.24%
32	Kab. Tapanuli Utara	13	38.24%
33	Kab. Toba Samosir	13	38.24%
34	Kota Binjai	15	44.12%
35	Kota Medan	13	38.24%
36	Kota Pematang Siantar	16	47.06%
37	Kota Sibolga	13	38.24%
38	Kota Tanjung Balai	14	41.18%
39	Kota Tebing Tinggi	15	44.12%
40	Kota Padang Sidempuan	15	44.12%
41	Kab. Pakpak Bharat	16	47.06%
42	Kab. Nias Selatan	13	38.24%
43	Kab. Humbang Hasundutan	14	41.18%
44	Kab. Serdang Bedagai	12	35.29%
45	Kab. Samosir	14	41.18%
46	Kab. Batu Bara	14	41.18%
47	Kab. Padang Lawas	13	38.24%
48	Kab. Padang Lawas Utara	12	35.29%

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
49	Kab. Labuhanbatu Selatan	12	35.29%
50	Kab. Labuhanbatu Utara	13	38.24%
51	Kab. Nias Utara	13	38.24%
52	Kab. Nias Barat	11	32.35%
53	Kota Gunungsitoli	9	26.47%
54	Prov. Sumatera Barat	12	35.29%
55	Kab. Limapuluh Kota	15	44.12%
56	Kab. Agam	14	41.18%
57	Kab. Kepulauan Mentawai	14	41.18%
58	Kab. Padang Pariaman	15	44.12%
59	Kab. Pasaman	14	41.18%
60	Kab. Pesisir Selatan	13	38.24%
61	Kab. Sijunjung	15	44.12%
62	Kab. Solok	13	38.24%
63	Kota Bukit Tinggi	17	50.00%
64	Kota Padang Panjang	13	38.24%
65	Kota Padang	14	41.18%
66	Kota Payakumbuh	15	44.12%
67	Kota Sawahlunto	14	41.18%
68	Kota Solok	13	38.24%
69	Kota Pariaman	14	41.18%
70	Kab. Pasaman Barat	14	41.18%
71	Kab. Dharmasraya	12	35.29%
72	Kab. Solok Selatan	12	35.29%
73	Kab. Tanah Datar	13	38.24%
74	Prov. Riau	16	47.06%
75	Kab. Bengkalis	14	41.18%
76	Kab. Indragiri Hilir	14	41.18%
77	Kab. Indragiri Hulu	12	35.29%
78	Kab. Kampar	13	38.24%
79	Kab. Kuantan Singingi	14	41.18%
80	Kab. Pelalawan	15	44.12%
81	Kab. Rokan Hilir	13	38.24%
82	Kab. Rokan Hulu	11	32.35%
83	Kab. Siak	15	44.12%
84	Kota Dumai	15	44.12%
85	Kota Pekanbaru	13	38.24%
86	Kab. Kepulauan Meranti	13	38.24%
87	Prov. Jambi	12	35.29%
88	Kab. Batanghari	17	50.00%
89	Kab. Bungo	14	41.18%
90	Kab. Kerinci	12	35.29%
91	Kab. Merangin	13	38.24%
92	Kab. Muaro Jambi	12	35.29%
93	Kab. Sarolangun	14	41.18%
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	12	35.29%
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	14	41.18%
96	Kab. Tebo	15	44.12%
97	Kota Jambi	14	41.18%
98	Kota Sungai Penuh	15	44.12%
99	Prov. Sumatera Selatan	14	41.18%
100	Kab. Lahat	15	44.12%

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
101	Kab. Musi Banyuasin	13	38.24%
102	Kab. Musi Rawas	13	38.24%
103	Kab. Muara Enim	16	47.06%
104	Kab. Ogan Komering Ilir	15	44.12%
105	Kab. Ogan Komering Ulu	15	44.12%
106	Kota Palembang	12	35.29%
107	Kota Prabumulih	12	35.29%
108	Kota Pagar Alam	13	38.24%
109	Kota Lubuk Linggau	13	38.24%
110	Kab. Banyuasin	12	35.29%
111	Kab. Ogan Ilir	9	26.47%
112	Kab. OKU Timur	13	38.24%
113	Kab. OKU Selatan	15	44.12%
114	Kab. Empat Lawang	13	38.24%
115	Prov. Bengkulu	13	38.24%
116	Kab. Bengkulu Selatan	14	41.18%
117	Kab. Bengkulu Utara	14	41.18%
118	Kab. Rejang Lebong	15	44.12%
119	Kota Bengkulu	14	41.18%
120	Kab. Kaur	13	38.24%
121	Kab. Seluma	13	38.24%
122	Kab. Mukomuko	15	44.12%
123	Kab. Lebong	14	41.18%
124	Kab. Kepahiang	13	38.24%
125	Kab. Bengkulu Tengah	13	38.24%
126	Prov. Lampung	14	41.18%
127	Kab. Lampung Selatan	17	50.00%
128	Kab. Lampung Tengah	16	47.06%
129	Kab. Lampung Utara	9	26.47%
130	Kab. Lampung Timur	11	32.35%
131	Kab. Tanggamus	12	35.29%
132	Kab. Tulang Bawang	15	44.12%
133	Kab. Way Kanan	13	38.24%
134	Kota Bandar Lampung	12	35.29%
135	Kota Metro	15	44.12%
136	Kab. Pesawaran	14	41.18%
137	Kab. Pringsewu	15	44.12%
138	Kab. Mesuji	15	44.12%
139	Kab. Tulang Bawang Barat	14	41.18%
140	Kab. Lampung Barat	14	41.18%
141	Prov. DKI Jakarta	16	47.06%
142	Prov. Jawa Barat	13	38.24%
143	Kab. Bandung	13	38.24%
144	Kab. Bekasi	12	35.29%
145	Kab. Bogor	13	38.24%
146	Kab. Ciamis	13	38.24%
147	Kab. Cianjur	14	41.18%
148	Kab. Cirebon	14	41.18%
149	Kab. Garut	15	44.12%
150	Kab. Indramayu	14	41.18%
151	Kab. Karawang	15	44.12%
152	Kab. Kuningan	12	35.29%

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
153	Kab. Majalengka	12	35.29%
154	Kab. Purwakarta	11	32.35%
155	Kab. Subang	14	41.18%
156	Kab. Sukabumi	17	50.00%
157	Kab. Sumedang	14	41.18%
158	Kab. Tasikmalaya	11	32.35%
159	Kota Bandung	13	38.24%
160	Kota Bekasi	15	44.12%
161	Kota Bogor	11	32.35%
162	Kota Cirebon	12	35.29%
163	Kota Sukabumi	13	38.24%
164	Kota Tasikmalaya	13	38.24%
165	Kota Cimahi	13	38.24%
166	Kota Banjar	14	41.18%
167	Kab. Bandung Barat	11	32.35%
168	Kota Depok	13	38.24%
169	Prov. Jawa Tengah	12	35.29%
170	Kab. Banjarnegara	13	38.24%
171	Kab. Banyumas	13	38.24%
172	Kab. Batang	13	38.24%
173	Kab. Blora	12	35.29%
174	Kab. Boyolali	13	38.24%
175	Kab. Brebes	15	44.12%
176	Kab. Cilacap	14	41.18%
177	Kab. Demak	15	44.12%
178	Kab. Grobogan	13	38.24%
179	Kab. Jepara	14	41.18%
180	Kab. Karanganyar	12	35.29%
181	Kab. Kebumen	13	38.24%
182	Kab. Kendal	13	38.24%
183	Kab. Klaten	17	50.00%
184	Kab. Kudus	13	38.24%
185	Kab. Magelang	13	38.24%
186	Kab. Pati	15	44.12%
187	Kab. Pekalongan	14	41.18%
188	Kab. Pemalang	14	41.18%
189	Kab. Purbalingga	15	44.12%
190	Kab. Purworejo	12	35.29%
191	Kab. Rembang	14	41.18%
192	Kab. Semarang	13	38.24%
193	Kab. Sragen	14	41.18%
194	Kab. Sukoharjo	13	38.24%
195	Kab. Tegal	13	38.24%
196	Kab. Temanggung	14	41.18%
197	Kab. Wonogiri	13	38.24%
198	Kab. Wonosobo	13	38.24%
199	Kota Magelang	14	41.18%
200	Kota Pekalongan	13	38.24%
201	Kota Salatiga	13	38.24%
202	Kota Semarang	14	41.18%
203	Kota Surakarta	13	38.24%
204	Kota Tegal	12	35.29%

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
205	Prov. DI Yogyakarta	16	47.06%
206	Kab. Bantul	14	41.18%
207	Kab. Gunung Kidul	14	41.18%
208	Kab. Kulon Progo	12	35.29%
209	Kab. Sleman	15	44.12%
210	Kota Yogyakarta	14	41.18%
211	Prov. Jawa Timur	12	35.29%
212	Kab. Bangkalan	13	38.24%
213	Kab. Banyuwangi	16	47.06%
214	Kab. Blitar	12	35.29%
215	Kab. Bojonegoro	13	38.24%
216	Kab. Bondowoso	14	41.18%
217	Kab. Gresik	14	41.18%
218	Kab. Jember	15	44.12%
219	Kab. Jombang	14	41.18%
220	Kab. Kediri	13	38.24%
221	Kab. Lamongan	15	44.12%
222	Kab. Lumajang	14	41.18%
223	Kab. Madiun	13	38.24%
224	Kab. Magetan	11	32.35%
225	Kab. Malang	13	38.24%
226	Kab. Mojokerto	13	38.24%
227	Kab. Nganjuk	13	38.24%
228	Kab. Ngawi	13	38.24%
229	Kab. Pacitan	13	38.24%
230	Kab. Pamekasan	14	41.18%
231	Kab. Pasuruan	15	44.12%
232	Kab. Ponorogo	13	38.24%
233	Kab. Probolinggo	15	44.12%
234	Kab. Sampang	13	38.24%
235	Kab. Sidoarjo	12	35.29%
236	Kab. Situbondo	14	41.18%
237	Kab. Sumenep	15	44.12%
238	Kab. Trenggalek	14	41.18%
239	Kab. Tuban	12	35.29%
240	Kab. Tulungagung	15	44.12%
241	Kota Blitar	15	44.12%
242	Kota Kediri	15	44.12%
243	Kota Madiun	14	41.18%
244	Kota Malang	12	35.29%
245	Kota Mojokerto	15	44.12%
246	Kota Pasuruan	14	41.18%
247	Kota Probolinggo	14	41.18%
248	Kota Surabaya	12	35.29%
249	Kota Batu	11	32.35%
250	Prov. Kalimantan Barat	14	41.18%
251	Kab. Bengkayang	11	32.35%
252	Kab. Landak	13	38.24%
253	Kab. Kapuas Hulu	13	38.24%
254	Kab. Ketapang	13	38.24%
255	Kab. Mempawah	8	23.53%
256	Kab. Sambas	12	35.29%



<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
257	Kab. Sanggau	11	32.35%
258	Kab. Sintang	13	38.24%
259	Kota Pontianak	14	41.18%
260	Kota Singkawang	13	38.24%
261	Kab. Sekadau	13	38.24%
262	Kab. Melawi	14	41.18%
263	Kab. Kayong Utara	12	35.29%
264	Kab. Kubu Raya	12	35.29%
265	Prov. Kalimantan Tengah	11	32.35%
266	Kab. Barito Selatan	15	44.12%
267	Kab. Barito Utara	10	29.41%
268	Kab. Kapuas	13	38.24%
269	Kab. Kotawaringin Barat	11	32.35%
270	Kab. Kotawaringin Timur	13	38.24%
271	Kota Palangkaraya	9	26.47%
272	Kab. Katingan	8	23.53%
273	Kab. Seruyan	14	41.18%
274	Kab. Sukamara	12	35.29%
275	Kab. Lamandau	15	44.12%
276	Kab. Gunung Mas	13	38.24%
277	Kab. Pulang Pisau	11	32.35%
278	Kab. Murung Raya	9	26.47%
279	Kab. Barito Timur	11	32.35%
280	Prov. Kalimantan Selatan	12	35.29%
281	Kab. Banjar	12	35.29%
282	Kab. Barito Kuala	12	35.29%
283	Kab. Hulu Sungai Selatan	15	44.12%
284	Kab. Hulu Sungai Tengah	14	41.18%
285	Kab. Hulu Sungai Utara	17	50.00%
286	Kab. Kotabaru	12	35.29%
287	Kab. Tabalong	13	38.24%
288	Kab. Tanah Laut	13	38.24%
289	Kab. Tapin	14	41.18%
290	Kota Banjarbaru	14	41.18%
291	Kota Banjarmasin	12	35.29%
292	Kab. Balangan	13	38.24%
293	Kab. Tanah Bumbu	14	41.18%
294	Prov. Kalimantan Timur	11	32.35%
295	Kab. Berau	13	38.24%
296	Kab. Kutai Barat	16	47.06%
297	Kab. Kutai Timur	12	35.29%
298	Kab. Paser	13	38.24%
299	Kota Balikpapan	12	35.29%
300	Kota Bontang	14	41.18%
301	Kota Samarinda	12	35.29%
302	Kab. Penajam Paser Utara	13	38.24%
303	Kab. Kutai Kartanegara	13	38.24%
304	Prov. Sulawesi Utara	15	44.12%
305	Kab. Bolaang Mongondow	12	35.29%
306	Kab. Minahasa	14	41.18%
307	Kab. Kepulauan Sangihe	15	44.12%
308	Kota Bitung	14	41.18%

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
309	Kota Manado	13	38.24%
310	Kab. Kepulauan Talaud	14	41.18%
311	Kab. Minahasa Selatan	14	41.18%
312	Kota Tomohon	11	32.35%
313	Kab. Minahasa Utara	13	38.24%
314	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	16	47.06%
315	Kota Kotamobagu	14	41.18%
316	Kab. Bolaang Mongondow Utara	19	55.88%
317	Kab. Minahasa Tenggara	14	41.18%
318	Kab. Bolaang Mongondow Timur	13	38.24%
319	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12	35.29%
320	Prov. Sulawesi Tengah	12	35.29%
321	Kab. Banggai	12	35.29%
322	Kab. Banggai Kepulauan	14	41.18%
323	Kab. Buol	14	41.18%
324	Kab. Tolitoli	12	35.29%
325	Kab. Donggala	13	38.24%
326	Kab. Morowali	16	47.06%
327	Kab. Poso	14	41.18%
328	Kota Palu	14	41.18%
329	Kab. Parigi Moutong	14	41.18%
330	Kab. Tojo Una Una	12	35.29%
331	Kab. Sigi	14	41.18%
332	Prov. Sulawesi Selatan	12	35.29%
333	Kab. Bantaeng	13	38.24%
334	Kab. Barru	13	38.24%
335	Kab. Bone	14	41.18%
336	Kab. Bulukumba	13	38.24%
337	Kab. Enrekang	14	41.18%
338	Kab. Gowa	14	41.18%
339	Kab. Jeneponto	13	38.24%
340	Kab. Luwu	15	44.12%
341	Kab. Luwu Utara	11	32.35%
342	Kab. Maros	13	38.24%
343	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	11	32.35%
344	Kota Palopo	14	41.18%
345	Kab. Luwu Timur	15	44.12%
346	Kab. Pinrang	14	41.18%
347	Kab. Sinjai	15	44.12%
348	Kab. Kepulauan Selayar	14	41.18%
349	Kab. Sidenreng Rappang	14	41.18%
350	Kab. Soppeng	18	52.94%
351	Kab. Takalar	14	41.18%
352	Kab. Tana Toraja	14	41.18%
353	Kab. Wajo	14	41.18%
354	Kota Pare-Pare	13	38.24%
355	Kota Makassar	17	50.00%
356	Kab. Toraja Utara	14	41.18%
357	Prov. Sulawesi Tenggara	14	41.18%
358	Kab. Buton	15	44.12%

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
359	Kab. Konawe	15	44.12%
360	Kab. Kolaka	12	35.29%
361	Kab. Muna	16	47.06%
362	Kota Kendari	14	41.18%
363	Kab. Konawe Selatan	15	44.12%
364	Kab. Wakatobi	13	38.24%
365	Kab. Kolaka Utara	13	38.24%
366	Kab. Konawe Utara	14	41.18%
367	Kab. Buton Utara	13	38.24%
368	Kab. Bombana	14	41.18%
369	Prov. Bali	13	38.24%
370	Kab. Badung	14	41.18%
371	Kab. Bangli	14	41.18%
372	Kab. Buleleng	14	41.18%
373	Kab. Jembrana	13	38.24%
374	Kab. Karangasem	13	38.24%
375	Kab. Klungkung	13	38.24%
376	Kab. Tabanan	14	41.18%
377	Kota Denpasar	12	35.29%
378	Kab. Gianyar	15	44.12%
379	Prov. Nusa Tenggara Barat	12	35.29%
380	Kab. Bima	14	41.18%
381	Kab. Lombok Barat	14	41.18%
382	Kab. Lombok Tengah	14	41.18%
383	Kab. Lombok Timur	13	38.24%
384	Kab. Sumbawa	14	41.18%
385	Kota Mataram	14	41.18%
386	Kota Bima	9	26.47%
387	Kab. Sumbawa Barat	15	44.12%
388	Kab. Dompu	14	41.18%
389	Kab. Lombok Utara	14	41.18%
390	Prov. Nusa Tenggara Timur	12	35.29%
391	Kab. Alor	14	41.18%
392	Kab. Belu	12	35.29%
393	Kab. Ende	15	44.12%
394	Kab. Flores Timur	13	38.24%
395	Kab. Manggarai	11	32.35%
396	Kab. Ngada	16	47.06%
397	Kab. Sumba Barat	12	35.29%
398	Kab. Sumba Timur	14	41.18%
399	Kab. Timor Tengah Selatan	11	32.35%
400	Kab. Timor Tengah Utara	12	35.29%
401	Kota Kupang	12	35.29%
402	Kab. Rote Ndao	18	52.94%
403	Kab. Manggarai Barat	19	55.88%
404	Kab. Nagekeo	10	29.41%
405	Kab. Sumba Barat Daya	13	38.24%
406	Kab. Manggarai Timur	12	35.29%
407	Kab. Sabu Raijua	12	35.29%
408	Kab. Kupang	13	38.24%
409	Kab. Lembata	15	44.12%
410	Kab. Sikka	13	38.24%

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
411	Kab. Sumba Tengah	9	26.47%
412	Prov. Maluku	9	26.47%
413	Kab. Maluku Tenggara Barat	13	38.24%
414	Kab. Maluku Tengah	12	35.29%
415	Kab. Buru	12	35.29%
416	Kota Ambon	8	23.53%
417	Kab. Seram Bagian Timur	12	35.29%
418	Kab. Kepulauan Aru	12	35.29%
419	Kota Tual	13	38.24%
420	Kab. Maluku Barat Daya	14	41.18%
421	Kab. Buru Selatan	13	38.24%
422	Kab. Maluku Tenggara	13	38.24%
423	Kab. Seram Bagian Barat	13	38.24%
424	Prov. Papua	13	38.24%
425	Kab. Biak Numfor	12	35.29%
426	Kab. Jayapura	13	38.24%
427	Kab. Merauke	13	38.24%
428	Kab. Mimika	11	32.35%
429	Kab. Nabire	13	38.24%
430	Kab. Kepulauan Yapen	11	32.35%
431	Kota Jayapura	13	38.24%
432	Kab. Keerom	12	35.29%
433	Kab. Pegunungan Bintang	14	41.18%
434	Kab. Boven Digoel	14	41.18%
435	Kab. Asmat	14	41.18%
436	Kab. Waropen	13	38.24%
437	Kab. Mamberamo Tengah	8	23.53%
438	Kab. Yalimo	12	35.29%
439	Kab. Dogiyai	12	35.29%
440	Kab. Intan Jaya	12	35.29%
441	Prov. Maluku Utara	11	32.35%
442	Kab. Halmahera Tengah	13	38.24%
443	Kota Ternate	11	32.35%
444	Kab. Halmahera Barat	13	38.24%
445	Kab. Halmahera Timur	15	44.12%
446	Kab. Halmahera Selatan	12	35.29%
447	Kab. Halmahera Utara	13	38.24%
448	Kota Tidore Kepulauan	14	41.18%
449	Kab. Pulau Morotai	13	38.24%
450	Kab. Kepulauan Sula	10	29.41%
451	Prov. Banten	15	44.12%
452	Kab. Lebak	15	44.12%
453	Kab. Pandeglang	14	41.18%
454	Kab. Serang	14	41.18%
455	Kab. Tangerang	15	44.12%
456	Kota Cilegon	13	38.24%
457	Kota Tangerang	12	35.29%
458	Kota Serang	14	41.18%
459	Kota Tangerang Selatan	14	41.18%
460	Prov. Bangka Belitung	13	38.24%
461	Kab. Bangka	12	35.29%
462	Kab. Belitung	13	38.24%

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN</b>	<b>% TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD</b>
463	Kota Pangkal Pinang	12	35.29%
464	Kab. Bangka Selatan	13	38.24%
465	Kab. Bangka Tengah	14	41.18%
466	Kab. Bangka Barat	15	44.12%
467	Kab. Belitung Timur	16	47.06%
468	Prov. Gorontalo	15	44.12%
469	Kab. Boalemo	13	38.24%
470	Kab. Gorontalo	16	47.06%
471	Kota Gorontalo	14	41.18%
472	Kab. Pohuwato	14	41.18%
473	Kab. Bone Bolango	14	41.18%
474	Kab. Gorontalo Utara	11	32.35%
475	Prov. Kepulauan Riau	14	41.18%
476	Kab. Natuna	13	38.24%
477	Kab. Kepulauan Anambas	11	32.35%
478	Kab. Karimun	15	44.12%
479	Kota Batam	16	47.06%
480	Kota Tanjung Pinang	14	41.18%
481	Kab. Lingga	14	41.18%
482	Kab. Bintan	14	41.18%
483	Prov. Papua Barat	10	29.41%
484	Kab. Fakfak	13	38.24%
485	Kab. Manokwari	12	35.29%
486	Kab. Sorong	13	38.24%
487	Kota Sorong	13	38.24%
488	Kab. Raja Ampat	11	32.35%
489	Kab. Sorong Selatan	13	38.24%
490	Kab. Teluk Bintuni	13	38.24%
491	Kab. Teluk Wondama	12	35.29%
492	Kab. Kaimana	14	41.18%
493	Kab. Tambrauw	12	35.29%
494	Kab. Maybrat	14	41.18%
495	Prov. Sulawesi Barat	15	44.12%
496	Kab. Majene	12	35.29%
497	Kab. Mamuju	13	38.24%
498	Kab. Polewali Mandar	14	41.18%
499	Kab. Mamasa	11	32.35%
500	Kab. Mamuju Utara	14	41.18%
501	Prov. Kalimantan Utara	13	38.24%
502	Kab. Bulungan	14	41.18%
503	Kab. Malinau	13	38.24%
504	Kab. Nunukan	11	32.35%
505	Kota Tarakan	13	38.24%
506	Kab. Tana Tidung	13	38.24%



**LAMPIRAN 7**  
**TOTAL ASET DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**TAHUN 2016**

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
1	Prov. Aceh	18,911,685,653,620	30.57	2,031,995,444,907	28.34
2	Kab. Aceh Barat	2,744,968,448,329	28.64	140,614,479,580	25.67
3	Kab. Aceh Besar	2,536,756,789,123	28.56	135,285,494,844	25.63
4	Kab. Aceh Selatan	2,269,447,507,014	28.45	125,989,165,879	25.56
5	Kab. Aceh Tengah	2,165,751,074,291	28.40	156,130,102,890	25.77
6	Kab. Aceh Timur	2,867,871,650,595	28.68	94,337,443,632	25.27
7	Kab. Aceh Utara	4,244,349,319,821	29.08	388,251,800,973	26.68
8	Kab. Bireuen	2,459,340,619,281	28.53	186,162,575,752	25.95
9	Kab. Simeulue	1,404,345,980,664	27.97	48,646,141,736	24.61
10	Kota Banda Aceh	4,152,704,636,701	29.05	258,591,409,669	26.28
11	Kota Sabang	1,309,279,594,653	27.90	47,776,631,105	24.59
12	Kota Langsa	1,432,051,067,700	27.99	121,369,467,376	25.52
13	Kab. Gayo Lues	1,955,704,252,985	28.30	46,277,349,072	24.56
14	Kab. Aceh Barat Daya	1,631,842,591,719	28.12	80,496,800,924	25.11
15	Kab. Aceh Jaya	1,957,237,893,183	28.30	45,774,374,212	24.55
16	Kab. Nagan Raya	1,699,425,152,855	28.16	104,202,917,807	25.37
17	Kab. Aceh Tamiang	1,889,846,753,491	28.27	114,051,092,364	25.46
18	Kab. Bener Meriah	1,410,209,767,496	27.97	66,455,656,138	24.92
19	Kota Subulussalam	1,064,650,371,186	27.69	42,314,514,319	24.47
20	Prov. Sumatera Utara	14,152,149,422,268	30.28	4,954,833,100,869	29.23
21	Kab. Asahan	3,230,743,738,942	28.80	52,170,348,430	24.68
22	Kab. Dairi	1,862,736,799,469	28.25	68,003,241,760	24.94
23	Kab. Deli Serdang	6,152,368,379,435	29.45	573,010,351,005	27.07
24	Kab. Karo	1,921,654,852,060	28.28	99,913,302,299	25.33
25	Kab. Labuhanbatu	2,501,444,360,859	28.55	125,955,642,338	25.56
26	Kab. Langkat	3,827,733,664,138	28.97	132,673,213,413	25.61
27	Kab. Mandailing Natal	1,970,863,374,639	28.31	70,405,901,828	24.98
28	Kab. Nias	1,498,497,455,141	28.04	82,840,434,009	25.14
29	Kab. Simalungun	3,028,693,942,919	28.74	132,560,800,826	25.61
30	Kab. Tapanuli Selatan	1,789,394,962,257	28.21	76,640,675,841	25.06
31	Kab. Tapanuli Tengah	1,407,151,256,273	27.97	71,758,981,995	25.00
32	Kab. Tapanuli Utara	2,008,985,435,220	28.33	94,783,154,638	25.27
33	Kab. Toba Samosir	1,655,388,193,590	28.14	54,391,304,393	24.72
34	Kota Binjai	1,216,039,923,741	27.83	97,339,497,584	25.30
35	Kota Medan	29,958,683,673,011	31.03	1,535,309,574,015	28.06
36	Kota Pematang Siantar	2,946,215,853,169	28.71	101,582,731,955	25.34
37	Kota Sibolga	1,465,138,453,121	28.01	68,537,902,708	24.95
38	Kota Tanjung Balai	1,271,940,346,896	27.87	87,445,115,902	25.19
39	Kota Tebing Tinggi	1,524,810,502,227	28.05	94,058,491,717	25.27
40	Kota Padang Sidempuan	1,146,652,789,324	27.77	78,417,755,706	25.09
41	Kab. Pakpak Bharat	912,481,989,844	27.54	18,748,805,556	23.65
42	Kab. Nias Selatan	1,493,386,650,706	28.03	16,263,067,492	23.51
43	Kab. Humbang Hasundutan	1,744,282,122,539	28.19	42,096,841,517	24.46
44	Kab. Serdang Bedagai	1,761,364,481,265	28.20	108,062,776,483	25.41
45	Kab. Samosir	1,593,266,053,882	28.10	39,268,200,307	24.39
46	Kab. Batu Bara	1,634,983,178,869	28.12	59,388,277,802	24.81
47	Kab. Padang Lawas	1,273,064,700,908	27.87	39,341,382,403	24.40
48	Kab. Padang Lawas Utara	1,181,750,931,336	27.80	30,453,223,133	24.14

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
49	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,176,711,936,982	27.79	42,507,928,169	24.47
50	Kab. Labuhanbatu Utara	2,188,698,815,512	28.41	42,296,115,862	24.47
51	Kab. Nias Utara	1,422,080,957,434	27.98	23,852,634,632	23.90
52	Kab. Nias Barat	794,261,576,021	27.40	15,616,742,531	23.47
53	Kota Gunungsitoli	1,504,430,764,965	28.04	29,185,403,160	24.10
54	Prov. Sumatera Barat	8,152,807,500,452	29.73	1,964,148,975,799	28.31
55	Kab. Limapuluh Kota	1,482,209,479,137	28.02	68,060,267,476	24.94
56	Kab. Agam	1,914,637,755,557	28.28	102,597,441,502	25.35
57	Kab. Kepulauan Mentawai	1,668,663,791,929	28.14	41,948,183,105	24.46
58	Kab. Padang Pariaman	1,298,842,171,023	27.89	72,859,394,001	25.01
59	Kab. Pasaman	1,812,496,843,993	28.23	88,862,264,200	25.21
60	Kab. Pesisir Selatan	2,081,442,252,462	28.36	108,915,294,628	25.41
61	Kab. Sijunjung	1,530,929,712,427	28.06	76,833,967,629	25.06
62	Kab. Solok	1,576,779,654,244	28.09	58,803,477,233	24.80
63	Kota Bukit Tinggi	1,492,027,311,191	28.03	71,303,781,736	24.99
64	Kota Padang Panjang	1,035,374,746,535	27.67	70,357,124,066	24.98
65	Kota Padang	6,881,114,488,678	29.56	391,925,662,647	26.69
66	Kota Payakumbuh	1,054,710,869,365	27.68	87,445,115,902	25.19
67	Kota Sawahlunto	645,974,565,709	27.19	53,388,553,983	24.70
68	Kota Solok	1,373,002,012,241	27.95	42,117,207,738	24.46
69	Kota Pariaman	880,690,952,872	27.50	29,680,784,158	24.11
70	Kab. Pasaman Barat	2,146,604,020,543	28.39	91,174,717,114	25.24
71	Kab. Dharmasraya	2,119,569,745,404	28.38	56,933,112,486	24.77
72	Kab. Solok Selatan	1,677,234,003,881	28.15	51,127,121,704	24.66
73	Kab. Tanah Datar	1,226,234,064,491	27.83	118,971,143,694	25.50
74	Prov. Riau	31,643,508,312,589	31.09	3,110,656,139,757	28.77
75	Kab. Bengkalis	9,389,823,582,814	29.87	199,026,650,970	26.02
76	Kab. Indragiri Hilir	3,870,730,869,504	28.98	132,442,800,061	25.61
77	Kab. Indragiri Hulu	3,219,894,090,738	28.80	98,894,896,774	25.32
78	Kab. Kampar	4,562,133,310,696	29.15	162,363,324,671	25.81
79	Kab. Kuantan Singingi	2,666,794,972,333	28.61	62,176,252,836	24.85
80	Kab. Pelalawan	3,678,294,498,783	28.93	107,077,951,961	25.40
81	Kab. Rokan Hilir	5,968,863,770,014	29.42	94,904,441,305	25.28
82	Kab. Rokan Hulu	2,803,516,966,111	28.66	95,812,025,222	25.29
83	Kab. Siak	6,320,318,192,966	29.47	164,325,689,824	25.83
84	Kota Dumai	3,239,329,920,169	28.81	192,760,175,686	25.98
85	Kota Pekanbaru	5,342,612,318,004	29.31	482,031,164,869	26.90
86	Kab. Kepulauan Meranti	2,780,338,676,668	28.65	52,413,812,665	24.68
87	Prov. Jambi	6,230,703,051,278	29.46	1,233,514,664,110	27.84
88	Kab. Batanghari	1,577,517,256,799	28.09	73,516,765,630	25.02
89	Kab. Bungo	1,488,648,208,368	28.03	114,818,287,091	25.47
90	Kab. Kerinci	1,465,745,126,874	28.01	80,850,837,270	25.12
91	Kab. Merangin	1,877,545,397,228	28.26	75,158,423,417	25.04
92	Kab. Muaro Jambi	2,248,798,145,446	28.44	60,630,301,196	24.83
93	Kab. Sarolangun	2,060,557,622,608	28.35	92,425,177,747	25.25
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	3,072,138,832,053	28.75	85,934,484,185	25.18
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,949,329,257,464	28.30	43,935,743,484	24.51
96	Kab. Tebo	2,226,181,406,808	28.43	60,938,006,779	24.83
97	Kota Jambi	2,672,003,493,493	28.61	287,525,214,004	26.38
98	Kota Sungai Penuh	1,201,533,843,754	27.81	36,632,476,994	24.32

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
99	Prov. Sumatera Selatan	15,278,308,894,172	30.36	2,546,177,544,349	28.57
100	Kab. Lahat	2,772,653,655,148	28.65	184,972,794,851	25.94
101	Kab. Musi Banyuasin	7,564,834,177,845	29.65	169,012,416,526	25.85
102	Kab. Musi Rawas	3,432,745,888,994	28.86	96,743,870,855	25.30
103	Kab. Muara Enim	4,616,358,748,719	29.16	150,912,522,963	25.74
104	Kab. Ogan Komering Ilir	3,314,522,960,391	28.83	108,992,378,485	25.41
105	Kab. Ogan Komering Ulu	2,595,601,870,566	28.58	87,578,643,416	25.20
106	Kota Palembang	7,493,109,764,660	29.65	781,413,947,765	27.38
107	Kota Prabumulih	2,514,674,680,393	28.55	86,253,193,267	25.18
108	Kota Pagar Alam	1,863,162,822,687	28.25	51,113,017,420	24.66
109	Kota Lubuk Linggau	2,300,506,409,744	28.46	75,797,426,519	25.05
110	Kab. Banyuasin	3,936,076,034,893	29.00	104,218,245,467	25.37
111	Kab. Ogan Ilir	2,251,240,807,348	28.44	109,762,617,128	25.42
112	Kab. OKU Timur	2,009,546,443,360	28.33	69,357,438,647	24.96
113	Kab. OKU Selatan	2,276,494,013,726	28.45	35,696,934,794	24.30
114	Kab. Empat Lawang	1,768,750,813,637	28.20	22,347,811,179	23.83
115	Prov. Bengkulu	3,902,701,234,736	28.99	731,556,734,070	27.32
116	Kab. Bengkulu Selatan	1,183,127,839,599	27.80	60,757,800,954	24.83
117	Kab. Bengkulu Utara	1,446,156,382,710	28.00	67,645,644,023	24.94
118	Kab. Rejang Lebong	1,473,467,273,081	28.02	71,294,600,225	24.99
119	Kota Bengkulu	1,920,228,815,813	28.28	110,831,838,872	25.43
120	Kab. Kaur	1,219,395,859,978	27.83	34,557,677,829	24.27
121	Kab. Seluma	1,414,719,445,375	27.98	28,643,738,976	24.08
122	Kab. Mukomuko	1,454,764,579,535	28.01	62,046,588,953	24.85
123	Kab. Lebong	1,527,931,920,445	28.05	17,147,511,384	23.57
124	Kab. Kepahiang	1,090,132,992,354	27.72	31,455,382,716	24.17
125	Kab. Bengkulu Tengah	1,106,806,272,228	27.73	27,252,845,778	24.03
126	Prov. Lampung	4,883,232,964,194	29.22	2,368,796,251,247	28.49
127	Kab. Lampung Selatan	2,918,000,366,100	28.70	184,063,778,379	25.94
128	Kab. Lampung Tengah	2,965,754,646,075	28.72	137,871,550,591	25.65
129	Kab. Lampung Utara	2,387,060,978,490	28.50	98,607,164,917	25.31
130	Kab. Lampung Timur	1,870,409,939,740	28.26	94,924,247,670	25.28
131	Kab. Tanggamus	2,068,271,227,398	28.36	23,712,889,208	23.89
132	Kab. Tulang Bawang	2,027,975,697,007	28.34	26,416,719,390	24.00
133	Kab. Way Kanan	1,942,039,539,428	28.29	44,346,945,472	24.52
134	Kota Bandar Lampung	3,969,587,683,022	29.01	483,379,398,035	26.90
135	Kota Metro	1,808,681,186,565	28.22	114,436,719,786	25.46
136	Kab. Pesawaran	1,787,318,611,629	28.21	41,956,848,583	24.46
137	Kab. Pringsewu	1,730,093,840,282	28.18	68,157,777,766	24.95
138	Kab. Mesuji	1,334,000,757,428	27.92	27,783,046,527	24.05
139	Kab. Tulang Bawang Barat	1,613,057,688,126	28.11	20,882,974,137	23.76
140	Kab. Lampung Barat	1,824,475,810,109	28.23	49,078,910,604	24.62
141	Prov. DKI Jakarta	442,977,223,000,927	33.72	36,888,017,587,716	31.24
142	Prov. Jawa Barat	28,286,541,521,361	30.97	17,042,895,113,672	30.47
143	Kab. Bandung	8,953,457,254,281	29.82	856,514,244,254	27.48
144	Kab. Bekasi	10,943,830,165,870	30.02	1,917,814,673,704	28.28
145	Kab. Bogor	18,650,432,444,880	30.56	2,292,175,674,801	28.46
146	Kab. Ciamis	3,143,991,962,867	28.78	204,759,434,820	26.05
147	Kab. Cianjur	4,822,611,461,067	29.20	455,156,876,756	26.84
148	Kab. Cirebon	3,474,845,177,903	28.88	309,999,137,348	26.46
149	Kab. Garut	3,772,049,891,805	28.96	385,312,223,032	26.68
150	Kab. Indramayu	4,256,353,026,922	29.08	351,177,413,767	26.58

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
151	Kab. Karawang	4,263,485,308,048	29.08	1,003,391,893,371	27.63
152	Kab. Kuningan	2,175,278,082,540	28.41	253,441,689,733	26.26
153	Kab. Majalengka	4,206,700,310,663	29.07	331,527,582,021	26.53
154	Kab. Purwakarta	2,323,920,993,437	28.47	341,116,103,330	26.56
155	Kab. Subang	4,671,542,628,536	29.17	435,000,331,439	26.80
156	Kab. Sukabumi	3,789,755,077,934	28.96	548,936,312,987	27.03
157	Kab. Sumedang	2,489,847,478,601	28.54	345,804,641,953	26.57
158	Kab. Tasikmalaya	4,059,021,894,153	29.03	216,227,321,380	26.10
159	Kota Bandung	24,020,098,774,436	30.81	2,152,755,704,962	28.40
160	Kota Bekasi	10,002,095,297,618	29.93	1,607,389,410,491	28.11
161	Kota Bogor	7,765,922,568,559	29.68	783,873,587,219	27.39
162	Kota Cirebon	3,345,491,135,181	28.84	363,117,732,284	26.62
163	Kota Sukabumi	1,517,331,588,965	28.05	295,257,670,781	26.41
164	Kota Tasikmalaya	2,882,255,014,361	28.69	254,532,699,376	26.26
165	Kota Cimahi	2,115,707,472,368	28.38	286,049,615,484	26.38
166	Kota Banjar	1,526,772,767,371	28.05	116,321,781,013	25.48
167	Kab. Bandung Barat	3,105,783,447,881	28.76	376,220,675,006	26.65
168	Kota Depok	9,738,603,123,182	29.91	922,288,964,276	27.55
169	Prov. Jawa Tengah	30,749,242,076,898	31.06	11,541,029,720,310	30.08
170	Kab. Banjarnegara	3,764,999,667,285	28.96	221,048,387,512	26.12
171	Kab. Banyumas	5,128,213,981,696	29.27	541,418,386,912	27.02
172	Kab. Batang	2,340,793,700,282	28.48	209,957,559,449	26.07
173	Kab. Blora	2,324,010,734,307	28.47	171,277,522,706	25.87
174	Kab. Boyolali	2,611,631,303,909	28.59	292,310,032,226	26.40
175	Kab. Brebes	2,792,866,204,611	28.66	339,156,063,168	26.55
176	Kab. Cilacap	4,019,210,952,136	29.02	428,598,349,897	26.78
177	Kab. Demak	3,345,653,792,396	28.84	287,457,500,571	26.38
178	Kab. Grobogan	2,578,827,973,057	28.58	334,951,418,168	26.54
179	Kab. Jepara	5,184,523,020,253	29.28	322,509,753,285	26.50
180	Kab. Karanganyar	2,785,959,656,094	28.66	301,307,800,956	26.43
181	Kab. Kebumen	4,090,343,910,748	29.04	291,016,321,703	26.40
182	Kab. Kendal	3,246,084,965,821	28.81	265,074,406,548	26.30
183	Kab. Klaten	3,483,587,981,231	28.88	224,197,408,481	26.14
184	Kab. Kudus	3,490,967,658,002	28.88	279,239,106,717	26.36
185	Kab. Magelang	2,830,231,260,318	28.67	288,485,678,128	26.39
186	Kab. Pati	5,620,068,520,754	29.36	314,921,084,791	26.48
187	Kab. Pekalongan	2,166,875,317,645	28.40	310,572,581,552	26.46
188	Kab. Pemalang	2,973,662,409,896	28.72	275,458,054,016	26.34
189	Kab. Purbalingga	2,267,477,749,800	28.45	251,816,668,602	26.25
190	Kab. Purworejo	2,415,635,223,398	28.51	255,599,240,424	26.27
191	Kab. Rembang	1,799,809,861,545	28.22	234,168,365,751	26.18
192	Kab. Semarang	2,759,751,487,194	28.65	318,536,051,176	26.49
193	Kab. Sragen	2,666,942,953,071	28.61	297,176,332,577	26.42
194	Kab. Sukoharjo	4,110,568,092,019	29.04	363,163,428,162	26.62
195	Kab. Tegal	2,795,204,576,013	28.66	316,051,189,734	26.48
196	Kab. Temanggung	2,765,376,607,595	28.65	281,328,148,970	26.36
197	Kab. Wonogiri	3,006,724,087,436	28.73	218,604,854,595	26.11
198	Kab. Wonosobo	2,403,339,743,555	28.51	199,894,767,510	26.02
199	Kota Magelang	2,920,893,584,607	28.70	220,315,848,702	26.12
200	Kota Pekalongan	2,177,047,983,430	28.41	178,604,460,870	25.91
201	Kota Salatiga	2,036,676,185,727	28.34	203,768,652,017	26.04
202	Kota Semarang	28,793,140,180,037	30.99	1,491,645,900,065	28.03
203	Kota Surakarta	6,730,489,559,718	29.54	425,502,779,064	26.78

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
204	Kota Tegal	2,077,720,243,078	28.36	287,338,673,112	26.38
205	Prov. DI Yogyakarta	6,050,819,887,074	29.43	1,673,749,196,522	28.15
206	Kab. Bantul	3,030,547,431,030	28.74	404,454,703,746	26.73
207	Kab. Gunung Kidul	2,157,344,040,684	28.40	206,278,865,616	26.05
208	Kab. Kulon Progo	1,625,139,115,946	28.12	180,273,363,595	25.92
209	Kab. Sleman	3,950,817,248,485	29.00	717,151,176,029	27.30
210	Kota Yogyakarta	3,750,224,434,123	28.95	540,504,305,182	27.02
211	Prov. Jawa Timur	30,127,166,768,665	31.04	15,817,795,024,797	30.39
212	Kab. Bangkalan	2,825,018,411,123	28.67	200,073,202,554	26.02
213	Kab. Banyuwangi	3,952,525,019,219	29.01	367,872,665,894	26.63
214	Kab. Blitar	3,276,050,662,673	28.82	224,106,765,169	26.14
215	Kab. Bojonegoro	4,202,697,186,239	29.07	340,407,679,609	26.55
216	Kab. Bondowoso	2,447,998,796,537	28.53	177,025,949,242	25.90
217	Kab. Gresik	4,877,773,576,632	29.22	715,480,938,191	27.30
218	Kab. Jember	4,163,520,410,592	29.06	524,137,897,017	26.99
219	Kab. Jombang	2,749,931,874,546	28.64	374,141,185,826	26.65
220	Kab. Kediri	3,644,896,096,678	28.92	339,113,897,822	26.55
221	Kab. Lamongan	3,936,924,453,223	29.00	403,474,462,147	26.72
222	Kab. Lumajang	2,194,277,106,621	28.42	242,111,541,252	26.21
223	Kab. Madiun	3,804,132,177,348	28.97	163,635,265,621	25.82
224	Kab. Magetan	1,757,396,551,762	28.19	165,617,751,404	25.83
225	Kab. Malang	5,443,623,023,756	29.33	502,754,981,975	26.94
226	Kab. Mojokerto	5,531,822,453,439	29.34	447,620,851,329	26.83
227	Kab. Nganjuk	2,616,641,950,429	28.59	323,045,177,742	26.50
228	Kab. Ngawi	2,677,125,202,104	28.62	195,606,461,847	26.00
229	Kab. Pacitan	1,928,491,626,214	28.29	150,466,067,821	25.74
230	Kab. Pamekasan	2,847,639,494,853	28.68	178,478,890,964	25.91
231	Kab. Pasuruan	3,239,481,822,492	28.81	480,758,720,671	26.90
232	Kab. Ponorogo	2,320,248,381,775	28.47	240,111,321,574	26.20
233	Kab. Probolinggo	2,234,234,936,253	28.43	221,719,364,518	26.12
234	Kab. Sampang	3,819,318,465,508	28.97	135,785,953,318	25.63
235	Kab. Sidoarjo	7,428,890,575,852	29.64	1,335,283,958,793	27.92
236	Kab. Situbondo	3,308,702,401,716	28.83	173,836,184,925	25.88
237	Kab. Sumenep	2,628,908,392,589	28.60	208,982,186,961	26.07
238	Kab. Trenggalek	2,128,043,490,614	28.39	182,174,291,709	25.93
239	Kab. Tuban	4,494,105,925,603	29.13	364,133,296,890	26.62
240	Kab. Tulungagung	3,223,112,024,221	28.80	342,570,756,799	26.56
241	Kota Blitar	2,228,582,896,965	28.43	131,920,190,721	25.61
242	Kota Kediri	3,010,540,382,227	28.73	238,318,315,508	26.20
243	Kota Madiun	2,383,862,311,722	28.50	173,235,929,828	25.88
244	Kota Malang	5,909,774,604,329	29.41	477,541,556,465	26.89
245	Kota Mojokerto	1,848,890,626,585	28.25	152,462,202,065	25.75
246	Kota Pasuruan	2,612,831,608,989	28.59	147,818,815,719	25.72
247	Kota Probolinggo	1,496,043,374,919	28.03	171,307,335,437	25.87
248	Kota Surabaya	38,689,329,720,728	31.29	4,091,867,015,500	29.04
249	Kota Batu	1,668,772,967,686	28.14	109,533,498,034	25.42
250	Prov. Kalimantan Barat	7,593,574,406,129	29.66	1,664,338,991,973	28.14
251	Kab. Bengkayang	1,733,026,378,097	28.18	42,677,133,440	24.48
252	Kab. Landak	3,001,688,424,546	28.73	57,178,239,742	24.77
253	Kab. Kapuas Hulu	2,712,246,814,295	28.63	67,135,520,050	24.93
254	Kab. Ketapang	3,428,994,068,014	28.86	134,597,765,564	25.63
255	Kab. Mempawah	1,419,056,977,395	27.98	65,094,642,233	24.90
256	Kab. Sambas	2,163,536,808,957	28.40	102,059,036,354	25.35



NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
257	Kab. Sanggau	2,030,391,853,506	28.34	93,326,584,200	25.26
258	Kab. Sintang	3,527,305,219,893	28.89	108,405,524,039	25.41
259	Kota Pontianak	2,684,626,306,944	28.62	389,368,654,493	26.69
260	Kota Singkawang	1,265,262,695,539	27.87	103,256,348,260	25.36
261	Kab. Sekadau	1,515,420,708,773	28.05	36,602,825,351	24.32
262	Kab. Melawi	1,778,134,991,899	28.21	34,129,257,682	24.25
263	Kab. Kayong Utara	1,182,436,810,518	27.80	10,812,481,174	23.10
264	Kab. Kubu Raya	2,112,568,599,036	28.38	101,310,299,207	25.34
265	Prov. Kalimantan Tengah	9,588,975,812,764	29.89	1,158,303,928,014	27.78
266	Kab. Barito Selatan	1,563,559,208,665	28.08	44,019,869,814	24.51
267	Kab. Barito Utara	2,720,131,332,441	28.63	56,816,976,473	24.76
268	Kab. Kapuas	3,061,120,307,268	28.75	85,832,949,197	25.18
269	Kab. Kotawaringin Barat	2,549,025,027,805	28.57	143,249,394,662	25.69
270	Kab. Kotawaringin Timur	3,067,215,793,069	28.75	189,388,000,097	25.97
271	Kota Palangkaraya	2,537,002,385,788	28.56	119,961,089,336	25.51
272	Kab. Katingan	2,504,104,815,128	28.55	46,280,722,192	24.56
273	Kab. Seruyan	3,115,312,939,125	28.77	56,880,204,217	24.76
274	Kab. Sukamara	1,777,474,058,892	28.21	38,622,540,535	24.38
275	Kab. Lamandau	1,721,895,948,700	28.17	45,563,687,664	24.54
276	Kab. Gunung Mas	1,996,228,789,006	28.32	37,472,944,511	24.35
277	Kab. Pulang Pisau	2,007,675,084,028	28.33	38,078,419,844	24.36
278	Kab. Murung Raya	2,742,084,302,206	28.64	33,853,527,199	24.25
279	Kab. Barito Timur	1,232,488,350,297	27.84	34,431,777,298	24.26
280	Prov. Kalimantan Selatan	11,138,742,854,862	30.04	2,500,073,656,774	28.55
281	Kab. Banjar	3,826,363,012,730	28.97	189,854,372,832	25.97
282	Kab. Barito Kuala	2,043,354,535,709	28.35	62,659,830,635	24.86
283	Kab. Hulu Sungai Selatan	2,610,035,459,284	28.59	115,118,953,303	25.47
284	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,983,614,573,251	28.32	96,994,158,192	25.30
285	Kab. Hulu Sungai Utara	2,265,990,123,309	28.45	95,440,232,947	25.28
286	Kab. Kotabaru	2,948,975,426,925	28.71	140,286,228,728	25.67
287	Kab. Tabalong	3,608,822,054,639	28.91	128,245,858,261	25.58
288	Kab. Tanah Laut	3,303,162,121,297	28.83	148,684,016,493	25.73
289	Kab. Tapin	2,147,820,823,460	28.40	57,163,594,658	24.77
290	Kota Banjarbaru	2,466,575,006,090	28.53	169,179,425,870	25.85
291	Kota Banjarmasin	4,641,000,696,375	29.17	247,258,423,246	26.23
292	Kab. Balangan	2,218,171,337,556	28.43	61,498,585,082	24.84
293	Kab. Tanah Bumbu	3,044,134,990,248	28.74	116,237,662,907	25.48
294	Prov. Kalimantan Timur	23,113,184,392,170	30.77	4,029,364,843,886	29.02
295	Kab. Berau	7,698,834,922,207	29.67	208,260,995,212	26.06
296	Kab. Kutai Barat	5,889,356,878,346	29.40	82,989,130,201	25.14
297	Kab. Kutai Timur	9,899,475,230,857	29.92	477,803,740,269	26.89
298	Kab. Paser	6,242,568,504,339	29.46	117,731,480,928	25.49
299	Kota Balikpapan	7,808,312,345,477	29.69	560,365,008,676	27.05
300	Kota Bontang	4,381,359,629,418	29.11	170,123,811,101	25.86
301	Kota Samarinda	11,838,702,468,827	30.10	391,404,293,291	26.69
302	Kab. Penajam Paser Utara	3,670,192,820,743	28.93	224,652,811,861	26.14
303	Kab. Kutai Kartanegara	18,399,370,663,642	30.54	279,443,901,302	26.36
304	Prov. Sulawesi Utara	6,150,958,263,759	29.45	981,044,559,607	27.61
305	Kab. Bolaang Mongondow	1,295,752,751,080	27.89	47,338,649,102	24.58
306	Kab. Minahasa	1,802,846,392,610	28.22	77,933,004,819	25.08
307	Kab. Kepulauan Sangihe	1,262,644,267,620	27.86	55,158,721,067	24.73
308	Kota Bitung	1,441,005,216,765	28.00	82,927,096,690	25.14

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
309	Kota Manado	2,981,603,557,755	28.72	345,215,373,491	26.57
310	Kab. Kepulauan Talaud	1,099,580,370,164	27.73	29,604,217,935	24.11
311	Kab. Minahasa Selatan	1,415,992,973,173	27.98	32,750,067,063	24.21
312	Kota Tomohon	1,581,654,640,749	28.09	26,011,141,966	23.98
313	Kab. Minahasa Utara	1,291,951,770,437	27.89	54,686,152,326	24.72
314	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,184,761,274,733	27.80	19,538,293,862	23.70
315	Kota Kotamobagu	1,243,461,341,906	27.85	39,195,723,854	24.39
316	Kab. Bolaang Mongondow Utara	944,564,064,270	27.57	17,828,737,030	23.60
317	Kab. Minahasa Tenggara	1,342,284,527,531	27.93	19,286,383,804	23.68
318	Kab. Bolaang Mongondow Timur	866,747,246,221	27.49	20,255,173,247	23.73
319	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	981,022,867,269	27.61	18,191,944,708	23.62
320	Prov. Sulawesi Tengah	4,211,734,102,129	29.07	939,092,069,082	27.57
321	Kab. Banggai	1,887,907,834,896	28.27	135,255,638,703	25.63
322	Kab. Banggai Kepulauan	3,048,279,257,601	28.75	18,882,843,133	23.66
323	Kab. Buol	1,526,508,616,992	28.05	53,259,653,066	24.70
324	Kab. Tolitoli	1,739,591,421,674	28.18	63,623,624,337	24.88
325	Kab. Donggala	1,738,562,384,298	28.18	70,883,672,512	24.98
326	Kab. Morowali	1,651,731,627,570	28.13	72,794,497,090	25.01
327	Kab. Poso	1,867,661,136,956	28.26	73,133,891,224	25.02
328	Kota Palu	2,201,317,699,294	28.42	279,586,962,581	26.36
329	Kab. Parigi Moutong	1,842,898,000,352	28.24	91,176,502,632	25.24
330	Kab. Tojo Una Una	1,615,076,751,746	28.11	48,453,761,094	24.60
331	Kab. Sigi	1,260,696,095,774	27.86	32,701,048,951	24.21
332	Prov. Sulawesi Selatan	9,137,116,284,120	29.84	3,449,561,308,105	28.87
333	Kab. Bantaeng	1,866,969,246,211	28.26	66,246,961,750	24.92
334	Kab. Barru	2,080,864,263,891	28.36	58,571,231,785	24.79
335	Kab. Bone	2,327,256,131,461	28.48	180,156,598,903	25.92
336	Kab. Bulukumba	2,149,034,489,252	28.40	128,782,030,975	25.58
337	Kab. Enrekang	1,706,307,616,052	28.17	56,383,446,989	24.76
338	Kab. Gowa	3,072,581,244,029	28.75	187,681,040,040	25.96
339	Kab. Jeneponto	1,847,722,864,883	28.24	77,638,677,214	25.08
340	Kab. Luwu	2,049,738,439,507	28.35	95,564,293,749	25.28
341	Kab. Luwu Utara	1,027,262,012,815	27.66	140,996,159,505	25.67
342	Kab. Maros	2,179,278,379,216	28.41	165,487,675,628	25.83
343	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,027,576,277,126	28.34	156,226,631,623	25.77
344	Kota Palopo	1,722,166,105,254	28.17	134,110,076,220	25.62
345	Kab. Luwu Timur	2,669,506,905,339	28.61	176,509,124,560	25.90
346	Kab. Pinrang	2,539,979,014,584	28.56	113,038,054,428	25.45
347	Kab. Sinjai	1,588,977,121,987	28.09	79,491,453,855	25.10
348	Kab. Kepulauan Selayar	2,172,459,471,816	28.41	43,167,309,586	24.49
349	Kab. Sidenreng Rappang	2,506,466,328,019	28.55	106,557,208,517	25.39
350	Kab. Soppeng	1,932,175,304,434	28.29	77,827,080,612	25.08
351	Kab. Takalar	1,484,003,523,312	28.03	95,625,946,515	25.28
352	Kab. Tana Toraja	1,797,192,701,555	28.22	103,662,620,550	25.36
353	Kab. Wajo	2,789,905,804,514	28.66	117,782,098,210	25.49
354	Kota Pare-Pare	2,042,554,310,243	28.35	136,313,232,055	25.64
355	Kota Makassar	27,993,334,048,814	30.96	971,859,753,606	27.60
356	Kab. Toraja Utara	1,135,321,574,874	27.76	34,896,515,042	24.28
357	Prov. Sulawesi Tenggara	8,189,043,983,872	29.73	753,658,254,464	27.35

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
358	Kab. Buton	1,318,343,583,607	27.91	39,141,765,858	24.39
359	Kab. Konawe	1,507,670,106,959	28.04	57,702,177,562	24.78
360	Kab. Kolaka	1,742,746,649,280	28.19	72,323,532,838	25.00
361	Kab. Muna	1,979,814,735,284	28.31	36,124,360,588	24.31
362	Kota Kendari	4,054,666,356,642	29.03	179,062,775,227	25.91
363	Kab. Konawe Selatan	2,293,594,756,023	28.46	48,026,667,119	24.60
364	Kab. Wakatobi	1,293,693,999,244	27.89	25,029,145,425	23.94
365	Kab. Kolaka Utara	1,571,837,766,972	28.08	40,246,173,438	24.42
366	Kab. Konawe Utara	1,330,264,866,961	27.92	11,576,604,080	23.17
367	Kab. Buton Utara	1,338,207,129,850	27.92	12,828,354,596	23.27
368	Kab. Bombana	1,393,665,107,140	27.96	31,274,205,870	24.17
369	Prov. Bali	8,554,849,314,154	29.78	3,041,195,258,456	28.74
370	Kab. Badung	11,720,889,102,641	30.09	3,563,589,483,327	28.90
371	Kab. Bangli	929,682,715,583	27.56	104,829,402,222	25.38
372	Kab. Buleleng	1,969,765,271,980	28.31	282,113,899,551	26.37
373	Kab. Jembrana	1,790,719,207,478	28.21	114,533,486,835	25.46
374	Kab. Karangasem	1,472,026,534,807	28.02	232,644,013,230	26.17
375	Kab. Klungkung	927,673,442,343	27.56	134,772,304,216	25.63
376	Kab. Tabanan	1,876,468,701,960	28.26	327,462,528,850	26.51
377	Kota Denpasar	3,085,928,580,758	28.76	807,042,113,054	27.42
378	Kab. Gianyar	1,772,624,616,239	28.20	1,018,972,627,873	27.65
379	Prov. Nusa Tenggara Barat	11,890,842,470,329	30.11	1,359,844,019,438	27.94
380	Kab. Bima	2,164,346,598,476	28.40	110,079,232,349	25.42
381	Kab. Lombok Barat	1,906,545,515,314	28.28	200,570,625,806	26.02
382	Kab. Lombok Tengah	2,438,732,881,497	28.52	165,997,896,761	25.84
383	Kab. Lombok Timur	2,595,265,850,768	28.58	236,147,475,251	26.19
384	Kab. Sumbawa	2,950,761,986,822	28.71	135,092,854,267	25.63
385	Kota Mataram	2,790,904,527,565	28.66	288,415,925,930	26.39
386	Kota Bima	1,113,187,000,815	27.74	30,524,799,756	24.14
387	Kab. Sumbawa Barat	2,152,403,330,861	28.40	57,982,409,736	24.78
388	Kab. Dompu	1,413,764,467,377	27.98	84,012,461,167	25.15
389	Kab. Lombok Utara	1,282,437,799,851	27.88	129,750,829,543	25.59
390	Prov. Nusa Tenggara Timur	5,354,336,886,083	29.31	995,186,120,952	27.63
391	Kab. Alor	1,281,050,723,936	27.88	45,718,605,435	24.55
392	Kab. Belu	1,249,027,071,417	27.85	74,823,080,565	25.04
393	Kab. Ende	1,420,741,709,119	27.98	68,865,679,023	24.96
394	Kab. Flores Timur	1,067,873,020,687	27.70	50,183,797,225	24.64
395	Kab. Manggarai	1,687,918,945,042	28.15	78,284,065,871	25.08
396	Kab. Ngada	1,754,291,399,817	28.19	47,502,339,405	24.58
397	Kab. Sumba Barat	1,419,798,121,931	27.98	60,967,608,812	24.83
398	Kab. Sumba Timur	2,086,316,668,858	28.37	68,222,357,518	24.95
399	Kab. Timor Tengah Selatan	1,397,536,597,490	27.97	71,848,806,283	25.00
400	Kab. Timor Tengah Utara	1,470,160,087,826	28.02	47,974,079,044	24.59
401	Kota Kupang	1,637,096,317,651	28.12	165,449,023,461	25.83
402	Kab. Rote Ndao	1,085,342,694,755	27.71	28,842,548,099	24.09
403	Kab. Manggarai Barat	1,842,740,631,141	28.24	91,068,685,754	25.23
404	Kab. Nagekeo	1,749,081,185,669	28.19	29,671,653,791	24.11
405	Kab. Sumba Barat Daya	1,162,449,391,468	27.78	43,510,608,957	24.50
406	Kab. Manggarai Timur	1,128,762,160,507	27.75	44,112,085,695	24.51
407	Kab. Sabu Raijua	1,023,719,762,108	27.65	31,439,614,081	24.17
408	Kab. Kupang	1,918,795,660,839	28.28	73,214,731,552	25.02

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
409	Kab. Lembata	725,962,658,661	27.31	35,723,669,619	24.30
410	Kab. Sikka	1,349,835,648,230	27.93	80,269,749,571	25.11
411	Kab. Sumba Tengah	952,898,835,518	27.58	22,142,086,431	23.82
412	Prov. Maluku	4,672,543,530,526	29.17	466,208,198,074	26.87
413	Kab. Maluku Tenggara Barat	1,383,848,547,027	27.96	32,640,578,961	24.21
414	Kab. Maluku Tengah	1,747,672,348,592	28.19	120,254,443,504	25.51
415	Kab. Buru	686,788,904,145	27.26	21,257,161,494	23.78
416	Kota Ambon	1,416,885,040,614	27.98	127,227,228,424	25.57
417	Kab. Seram Bagian Timur	1,614,570,103,610	28.11	21,548,344,163	23.79
418	Kab. Kepulauan Aru	1,485,678,940,718	28.03	28,037,720,937	24.06
419	Kota Tual	851,937,336,228	27.47	19,691,231,855	23.70
420	Kab. Maluku Barat Daya	1,277,554,703,123	27.88	40,264,112,918	24.42
421	Kab. Buru Selatan	1,223,835,531,283	27.83	26,985,938,551	24.02
422	Kab. Maluku Tenggara	1,161,803,600,619	27.78	52,955,616,639	24.69
423	Kab. Seram Bagian Barat	1,294,296,826,847	27.89	25,988,089,631	23.98
424	Prov. Papua	19,128,988,032,431	30.58	1,019,732,912,605	27.65
425	Kab. Biak Numfor	1,311,080,374,960	27.90	22,928,633,070	23.86
426	Kab. Jayapura	2,190,258,252,437	28.42	87,394,171,937	25.19
427	Kab. Merauke	5,372,930,885,232	29.31	166,441,748,859	25.84
428	Kab. Mimika	3,975,089,360,556	29.01	305,372,673,108	26.44
429	Kab. Nabire	1,783,851,211,685	28.21	51,434,040,465	24.66
430	Kab. Kepulauan Yapen	1,657,065,981,946	28.14	57,427,069,526	24.77
431	Kota Jayapura	2,475,898,191,341	28.54	164,831,615,678	25.83
432	Kab. Keerom	2,477,855,272,071	28.54	63,814,379,210	24.88
433	Kab. Pegunungan Bintang	2,498,751,633,163	28.55	20,139,473,413	23.73
434	Kab. Boven Digoel	3,079,732,167,904	28.76	27,580,049,109	24.04
435	Kab. Asmat	2,282,805,647,012	28.46	71,346,686,858	24.99
436	Kab. Waropen	1,865,009,079,678	28.25	6,851,483,623	22.65
437	Kab. Mamberamo Tengah	2,747,455,127,462	28.64	14,380,797,668	23.39
438	Kab. Yalimo	1,568,972,363,984	28.08	18,320,960,672	23.63
439	Kab. Dogiyai	1,374,622,658,073	27.95	10,405,761,225	23.07
440	Kab. Intan Jaya	2,154,120,613,416	28.40	18,243,656,973	23.63
441	Prov. Maluku Utara	2,873,883,233,063	28.69	280,150,113,343	26.36
442	Kab. Halmahera Tengah	1,530,721,830,487	28.06	13,737,492,714	23.34
443	Kota Ternate	1,366,107,612,686	27.94	69,390,176,544	24.96
444	Kab. Halmahera Barat	897,548,614,820	27.52	25,353,045,666	23.96
445	Kab. Halmahera Timur	1,722,950,529,978	28.18	25,176,739,490	23.95
446	Kab. Halmahera Selatan	1,476,182,703,274	28.02	25,137,301,794	23.95
447	Kab. Halmahera Utara	1,315,231,940,501	27.91	80,809,624,568	25.12
448	Kota Tidore Kepulauan	1,276,200,536,162	27.87	38,730,904,763	24.38
449	Kab. Pulau Morotai	751,320,688,025	27.35	7,538,512,481	22.74
450	Kab. Kepulauan Sula	1,317,625,375,277	27.91	20,979,430,591	23.77
451	Prov. Banten	10,034,979,988,831	29.94	5,463,156,734,851	29.33
452	Kab. Lebak	4,604,255,410,412	29.16	304,485,931,938	26.44
453	Kab. Pandeglang	2,505,560,894,234	28.55	199,255,711,793	26.02
454	Kab. Serang	3,717,634,888,244	28.94	590,865,666,125	27.10
455	Kab. Tangerang	10,181,098,127,138	29.95	2,054,715,995,931	28.35
456	Kota Cilegon	3,128,266,200,943	28.77	567,671,194,175	27.06
457	Kota Tangerang	6,971,379,397,784	29.57	1,590,080,330,000	28.09
458	Kota Serang	2,579,525,829,246	28.58	126,900,900,019	25.57

NO	KAB/KOTA	TOTAL ASET		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		NILAI TOTAL ASET	ASET (X <sub>1</sub> )	NILAI TOTAL PAD	PAD (X <sub>2</sub> )
459	Kota Tangerang Selatan	18,271,462,377,991	30.54	1,346,240,155,744	27.93
460	Prov. Bangka Belitung	3,776,442,444,257	28.96	574,258,443,820	27.08
461	Kab. Bangka	1,634,169,272,959	28.12	129,059,621,691	25.58
462	Kab. Belitung	1,600,547,793,580	28.10	138,227,681,152	25.65
463	Kota Pangkal Pinang	2,236,597,582,531	28.44	136,272,241,336	25.64
464	Kab. Bangka Selatan	1,157,040,313,320	27.78	46,255,276,506	24.56
465	Kab. Bangka Tengah	1,210,428,784,654	27.82	73,459,526,744	25.02
466	Kab. Bangka Barat	1,271,126,705,113	27.87	52,662,192,020	24.69
467	Kab. Belitung Timur	1,472,276,145,997	28.02	90,361,562,417	25.23
468	Prov. Gorontalo	1,725,280,421,554	28.18	311,223,202,412	26.46
469	Kab. Boalemo	1,379,284,761,603	27.95	48,794,270,893	24.61
470	Kab. Gorontalo	1,380,539,667,463	27.95	125,271,076,534	25.55
471	Kota Gorontalo	1,574,668,220,944	28.09	172,315,775,595	25.87
472	Kab. Pohuwato	1,146,957,224,324	27.77	62,981,898,282	24.87
473	Kab. Bone Bolango	1,191,819,049,738	27.81	62,079,454,189	24.85
474	Kab. Gorontalo Utara	867,004,456,440	27.49	24,586,696,146	23.93
475	Prov. Kepulauan Riau	3,872,940,317,954	28.99	1,079,309,741,999	27.71
476	Kab. Natuna	2,687,954,690,736	28.62	53,414,566,344	24.70
477	Kab. Kepulauan Anambas	1,666,320,516,595	28.14	34,180,165,616	24.25
478	Kab. Karimun	2,096,644,282,715	28.37	397,519,426,167	26.71
479	Kota Batam	3,758,068,876,311	28.95	881,268,969,157	27.50
480	Kota Tanjung Pinang	1,431,743,942,932	27.99	126,045,740,738	25.56
481	Kab. Lingga	1,515,863,098,360	28.05	21,017,262,865	23.77
482	Kab. Bintan	2,385,365,681,028	28.50	206,292,379,207	26.05
483	Prov. Papua Barat	9,030,570,639,652	29.83	338,811,109,229	26.55
484	Kab. Fakfak	2,649,303,210,679	28.61	47,179,201,342	24.58
485	Kab. Manokwari	2,264,963,858,766	28.45	51,522,059,446	24.67
486	Kab. Sorong	3,429,739,980,055	28.86	78,909,742,415	25.09
487	Kota Sorong	1,975,219,439,369	28.31	94,192,250,218	25.27
488	Kab. Raja Ampat	2,508,753,027,502	28.55	49,976,464,585	24.63
489	Kab. Sorong Selatan	1,856,893,944,075	28.25	34,368,671,007	24.26
490	Kab. Teluk Bintuni	4,580,903,649,003	29.15	53,214,917,711	24.70
491	Kab. Teluk Wondama	1,848,354,697,869	28.25	11,293,867,633	23.15
492	Kab. Kaimana	1,820,022,387,688	28.23	39,983,149,612	24.41
493	Kab. Tambrauw	1,895,025,488,969	28.27	6,128,330,767	22.54
494	Kab. Maybrat	1,404,802,470,742	27.97	6,303,471,491	22.56
495	Prov. Sulawesi Barat	1,899,310,955,012	28.27	277,686,126,682	26.35
496	Kab. Majene	1,480,841,329,842	28.02	50,615,846,996	24.65
497	Kab. Mamuju	1,924,688,808,459	28.29	66,800,589,253	24.92
498	Kab. Polewali Mandar	1,968,707,152,082	28.31	126,047,973,814	25.56
499	Kab. Mamasa	1,233,114,952,074	27.84	27,487,847,471	24.04
500	Kab. Mamuju Utara	1,468,992,748,136	28.02	27,629,986,869	24.04
501	Prov. Kalimantan Utara	3,085,669,426,622	28.76	507,955,516,972	26.95
502	Kab. Bulungan	6,404,963,823,323	29.49	101,880,725,424	25.35
503	Kab. Malinau	5,359,454,379,542	29.31	52,950,090,446	24.69
504	Kab. Nunukan	5,646,173,881,113	29.36	53,381,996,459	24.70
505	Kota Tarakan	6,263,379,500,087	29.47	62,198,512,279	24.85
506	Kab. Tana Tidung	3,130,113,171,084	28.77	20,990,208,702	23.77

**LAMPIRAN 8**  
**JUMLAH ANGGOTA DPRD DAN TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
1	Prov. Aceh	81	14	13
2	Kab. Aceh Barat	25	9	11
3	Kab. Aceh Besar	35	4	12
4	Kab. Aceh Selatan	30	11	6
5	Kab. Aceh Tengah	30	8	8
6	Kab. Aceh Timur	40	7	12
7	Kab. Aceh Utara	45	8	9
8	Kab. Bireuen	40	7	8
9	Kab. Simeulue	20	16	7
10	Kota Banda Aceh	30	8	4
11	Kota Sabang	20	9	3
12	Kota Langsa	25	8	8
13	Kab. Gayo Lues	20	7	7
14	Kab. Aceh Barat Daya	25	4	5
15	Kab. Aceh Jaya	20	10	9
16	Kab. Nagan Raya	25	8	7
17	Kab. Aceh Tamiang	30	13	11
18	Kab. Bener Meriah	25	11	6
19	Kota Subulussalam	20	9	11
20	Prov. Sumatera Utara	100	15	4
21	Kab. Asahan	45	9	8
22	Kab. Dairi	35	4	5
23	Kab. Deli Serdang	50	16	7
24	Kab. Karo	30	5	5
25	Kab. Labuhanbatu	45	6	4
26	Kab. Langkat	50	7	5
27	Kab. Mandailing Natal	40	6	9
28	Kab. Nias	25	10	3
29	Kab. Simalungun	50	10	6
30	Kab. Tapanuli Selatan	30	5	5
31	Kab. Tapanuli Tengah	35	8	6
32	Kab. Tapanuli Utara	35	8	7
33	Kab. Toba Samosir	30	10	5
34	Kota Binjai	30	5	6
35	Kota Medan	50	16	11
36	Kota Pematang Siantar	30	7	4
37	Kota Sibolga	20	16	7
38	Kota Tanjung Balai	25	11	10
39	Kota Tebing Tinggi	25	7	6
40	Kota Padang Sidempuan	30	13	8
41	Kab. Pakpak Bharat	20	8	6
42	Kab. Nias Selatan	35	9	9
43	Kab. Humbang Hasundutan	25	9	5
44	Kab. Serdang Bedagai	45	6	6
45	Kab. Samosir	25	9	8
46	Kab. Batu Bara	35	8	9
47	Kab. Padang Lawas	30	6	10
48	Kab. Padang Lawas Utara	30	7	7
49	Kab. Labuhanbatu Selatan	35	4	5

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
50	Kab. Labuhanbatu Utara	35	4	4
51	Kab. Nias Utara	25	5	7
52	Kab. Nias Barat	20	6	9
53	Kota Gunungsitoli	25	7	3
54	Prov. Sumatera Barat	65	5	7
55	Kab. Limapuluh Kota	35	7	5
56	Kab. Agam	45	3	6
57	Kab. Kepulauan Mentawai	20	6	12
58	Kab. Padang Pariaman	40	10	8
59	Kab. Pasaman	35	6	13
60	Kab. Pesisir Selatan	45	9	9
61	Kab. Sijunjung	30	6	6
62	Kab. Solok	20	13	6
63	Kota Bukit Tinggi	25	6	4
64	Kota Padang Panjang	20	10	7
65	Kota Padang	45	7	5
66	Kota Payakumbuh	25	3	6
67	Kota Sawahlunto	20	8	5
68	Kota Solok	35	8	7
69	Kota Pariaman	20	6	6
70	Kab. Pasaman Barat	40	9	4
71	Kab. Dharmasraya	25	8	12
72	Kab. Solok Selatan	25	7	9
73	Kab. Tanah Datar	35	10	4
74	Prov. Riau	65	12	17
75	Kab. Bengkalis	45	10	15
76	Kab. Indragiri Hilir	45	14	17
77	Kab. Indragiri Hulu	40	20	15
78	Kab. Kampar	45	10	7
79	Kab. Kuantan Singingi	35	6	17
80	Kab. Pelalawan	35	7	11
81	Kab. Rokan Hilir	45	9	10
82	Kab. Rokan Hulu	45	15	15
83	Kab. Siak	40	11	9
84	Kota Dumai	30	9	4
85	Kota Pekanbaru	45	13	14
86	Kab. Kepulauan Meranti	30	10	12
87	Prov. Jambi	55	10	7
88	Kab. Batanghari	35	3	5
89	Kab. Bungo	35	14	4
90	Kab. Kerinci	30	5	5
91	Kab. Merangin	35	10	5
92	Kab. Muaro Jambi	35	7	8
93	Kab. Sarolangun	35	7	8
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	35	12	10
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	30	9	14
96	Kab. Tebo	35	5	4
97	Kota Jambi	45	11	5
98	Kota Sungai Penuh	25	4	9
99	Prov. Sumatera Selatan	75	11	11
100	Kab. Lahat	40	7	10
101	Kab. Musi Banyuasin	45	9	10

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
102	Kab. Musi Rawas	45	10	10
103	Kab. Muara Enim	45	3	7
104	Kab. Ogan Komering Ilir	45	4	17
105	Kab. Ogan Komering Ulu	35	9	8
106	Kota Palembang	45	12	18
107	Kota Prabumulih	25	7	8
108	Kota Pagar Alam	25	8	12
109	Kota Lubuk Linggau	30	11	7
110	Kab. Banyuasin	45	5	6
111	Kab. Ogan Ilir	40	4	4
112	Kab. OKU Timur	45	6	10
113	Kab. OKU Selatan	40	7	13
114	Kab. Empat Lawang	35	7	11
115	Prov. Bengkulu	45	11	13
116	Kab. Bengkulu Selatan	25	7	4
117	Kab. Bengkulu Utara	30	10	11
118	Kab. Rejang Lebong	30	5	8
119	Kota Bengkulu	35	14	9
120	Kab. Kaur	25	16	8
121	Kab. Seluma	30	10	7
122	Kab. Mukomuko	25	10	7
123	Kab. Lebong	25	16	10
124	Kab. Kepahiang	25	5	6
125	Kab. Bengkulu Tengah	25	3	3
126	Prov. Lampung	85	11	9
127	Kab. Lampung Selatan	50	6	5
128	Kab. Lampung Tengah	50	6	7
129	Kab. Lampung Utara	45	8	5
130	Kab. Lampung Timur	50	12	5
131	Kab. Tanggamus	45	7	7
132	Kab. Tulang Bawang	45	4	5
133	Kab. Way Kanan	40	4	4
134	Kota Bandar Lampung	50	6	7
135	Kota Metro	25	8	6
136	Kab. Pesawaran	45	7	8
137	Kab. Pringsewu	40	5	4
138	Kab. Mesuji	35	6	8
139	Kab. Tulang Bawang Barat	30	5	8
140	Kab. Lampung Barat	40	4	2
141	Prov. DKI Jakarta	106	35	15
142	Prov. Jawa Barat	100	7	9
143	Kab. Bandung	50	7	13
144	Kab. Bekasi	50	10	10
145	Kab. Bogor	50	3	9
146	Kab. Ciamis	50	7	2
147	Kab. Cianjur	50	7	8
148	Kab. Cirebon	50	2	8
149	Kab. Garut	50	7	7
150	Kab. Indramayu	50	8	5
151	Kab. Karawang	50	9	7
152	Kab. Kuningan	50	8	7
153	Kab. Majalengka	50	4	6



NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
154	Kab. Purwakarta	45	8	6
155	Kab. Subang	50	10	6
156	Kab. Sukabumi	50	9	5
157	Kab. Sumedang	50	4	3
158	Kab. Tasikmalaya	50	5	6
159	Kota Bandung	50	8	10
160	Kota Bekasi	50	9	9
161	Kota Bogor	45	12	6
162	Kota Cirebon	35	12	3
163	Kota Sukabumi	35	9	10
164	Kota Tasikmalaya	45	7	6
165	Kota Cimahi	45	9	7
166	Kota Banjar	25	3	4
167	Kab. Bandung Barat	50	11	9
168	Kota Depok	50	7	2
169	Prov. Jawa Tengah	100	11	17
170	Kab. Banjarnegara	45	5	8
171	Kab. Banyumas	50	5	5
172	Kab. Batang	45	4	11
173	Kab. Blora	45	7	5
174	Kab. Boyolali	45	10	5
175	Kab. Brebes	50	7	5
176	Kab. Cilacap	50	11	4
177	Kab. Demak	50	10	9
178	Kab. Grobogan	50	9	12
179	Kab. Jepara	50	9	6
180	Kab. Karanganyar	45	6	6
181	Kab. Kebumen	50	5	7
182	Kab. Kendal	45	10	12
183	Kab. Klaten	50	4	5
184	Kab. Kudus	45	14	7
185	Kab. Magelang	50	7	8
186	Kab. Pati	50	3	6
187	Kab. Pekalongan	30	13	8
188	Kab. Pemalang	50	7	7
189	Kab. Purbalingga	45	5	9
190	Kab. Purworejo	45	3	9
191	Kab. Rembang	45	7	7
192	Kab. Semarang	45	4	5
193	Kab. Sragen	45	7	10
194	Kab. Sukoharjo	45	7	9
195	Kab. Tegal	50	5	7
196	Kab. Temanggung	45	6	5
197	Kab. Wonogiri	45	4	7
198	Kab. Wonosobo	45	7	13
199	Kota Magelang	25	7	7
200	Kota Pekalongan	45	7	1
201	Kota Salatiga	25	13	6
202	Kota Semarang	50	10	6
203	Kota Surakarta	45	8	11
204	Kota Tegal	30	8	4
205	Prov. DI Yogyakarta	55	5	4

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
206	Kab. Bantul	45	11	5
207	Kab. Gunung Kidul	45	6	6
208	Kab. Kulon Progo	40	6	7
209	Kab. Sleman	50	7	11
210	Kota Yogyakarta	40	4	8
211	Prov. Jawa Timur	100	4	4
212	Kab. Bangkalan	50	6	4
213	Kab. Banyuwangi	50	4	7
214	Kab. Blitar	50	6	6
215	Kab. Bojonegoro	50	8	7
216	Kab. Bondowoso	45	7	7
217	Kab. Gresik	50	7	4
218	Kab. Jember	50	9	5
219	Kab. Jombang	50	6	7
220	Kab. Kediri	50	6	3
221	Kab. Lamongan	50	3	7
222	Kab. Lumajang	50	7	2
223	Kab. Madiun	45	7	7
224	Kab. Magetan	45	7	5
225	Kab. Malang	50	5	11
226	Kab. Mojokerto	50	4	9
227	Kab. Nganjuk	45	5	5
228	Kab. Ngawi	45	5	9
229	Kab. Pacitan	40	5	5
230	Kab. Pamekasan	45	8	4
231	Kab. Pasuruan	50	3	2
232	Kab. Ponorogo	45	6	5
233	Kab. Probolinggo	45	9	2
234	Kab. Sampang	45	12	5
235	Kab. Sidoarjo	50	10	9
236	Kab. Situbondo	45	5	6
237	Kab. Sumenep	50	7	9
238	Kab. Trenggalek	45	10	5
239	Kab. Tuban	50	6	5
240	Kab. Tulungagung	50	4	7
241	Kota Blitar	25	7	6
242	Kota Kediri	30	8	3
243	Kota Madiun	30	5	4
244	Kota Malang	45	5	4
245	Kota Mojokerto	25	5	6
246	Kota Pasuruan	30	11	4
247	Kota Probolinggo	30	6	6
248	Kota Surabaya	50	4	7
249	Kota Batu	25	10	7
250	Prov. Kalimantan Barat	65	4	5
251	Kab. Bengkayang	30	5	4
252	Kab. Landak	35	6	2
253	Kab. Kapuas Hulu	30	4	4
254	Kab. Ketapang	45	4	6
255	Kab. Mempawah	30	5	4
256	Kab. Sambas	45	3	1
257	Kab. Sanggau	40	5	4

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
258	Kab. Sintang	35	7	6
259	Kota Pontianak	45	7	3
260	Kota Singkawang	30	4	2
261	Kab. Sekadau	30	3	3
262	Kab. Melawi	30	7	3
263	Kab. Kayong Utara	25	6	3
264	Kab. Kubu Raya	45	6	3
265	Prov. Kalimantan Tengah	45	10	6
266	Kab. Barito Selatan	25	9	6
267	Kab. Barito Utara	25	12	2
268	Kab. Kapuas	40	9	8
269	Kab. Kotawaringin Barat	30	6	3
270	Kab. Kotawaringin Timur	40	8	6
271	Kota Palangkaraya	30	8	3
272	Kab. Katingan	25	6	4
273	Kab. Seruyan	25	8	7
274	Kab. Sukamara	20	5	8
275	Kab. Lamandau	20	8	3
276	Kab. Gunung Mas	25	6	2
277	Kab. Pulang Pisau	25	5	1
278	Kab. Murung Raya	25	7	3
279	Kab. Barito Timur	25	7	11
280	Prov. Kalimantan Selatan	55	6	7
281	Kab. Banjar	45	6	3
282	Kab. Barito Kuala	35	7	6
283	Kab. Hulu Sungai Selatan	30	9	4
284	Kab. Hulu Sungai Tengah	30	7	4
285	Kab. Hulu Sungai Utara	30	5	4
286	Kab. Kotabaru	35	6	5
287	Kab. Tabalong	30	11	6
288	Kab. Tanah Laut	35	9	3
289	Kab. Tapin	25	6	3
290	Kota Banjarbaru	30	7	5
291	Kota Banjarmasin	45	8	2
292	Kab. Balangan	25	7	2
293	Kab. Tanah Bumbu	35	6	4
294	Prov. Kalimantan Timur	55	8	3
295	Kab. Berau	30	7	9
296	Kab. Kutai Barat	25	8	15
297	Kab. Kutai Timur	40	4	8
298	Kab. Paser	30	14	5
299	Kota Balikpapan	45	5	6
300	Kota Bontang	25	5	7
301	Kota Samarinda	45	9	12
302	Kab. Penajam Paser Utara	25	7	7
303	Kab. Kutai Kartanegara	45	6	5
304	Prov. Sulawesi Utara	45	3	16
305	Kab. Bolaang Mongondow	30	7	6
306	Kab. Minahasa	35	10	11
307	Kab. Kepulauan Sangihe	25	6	10
308	Kota Bitung	30	10	8
309	Kota Manado	40	12	12

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
310	Kab. Kepulauan Talaud	25	3	3
311	Kab. Minahasa Selatan	30	8	12
312	Kota Tomohon	20	9	14
313	Kab. Minahasa Utara	30	3	9
314	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	20	10	6
315	Kota Kotamobagu	25	5	1
316	Kab. Bolaang Mongondow Utara	20	8	7
317	Kab. Minahasa Tenggara	25	9	7
318	Kab. Bolaang Mongondow Timur	20	16	9
319	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	20	7	3
320	Prov. Sulawesi Tengah	45	7	6
321	Kab. Banggai	35	8	10
322	Kab. Banggai Kepulauan	35	10	10
323	Kab. Buol	25	8	7
324	Kab. Tolitoli	30	10	6
325	Kab. Donggala	30	9	16
326	Kab. Morowali	30	6	14
327	Kab. Poso	30	6	8
328	Kota Palu	35	9	8
329	Kab. Parigi Moutong	40	7	12
330	Kab. Tojo Una Una	25	9	10
331	Kab. Sigi	30	11	12
332	Prov. Sulawesi Selatan	85	10	8
333	Kab. Bantaeng	25	7	4
334	Kab. Barru	25	11	10
335	Kab. Bone	45	4	4
336	Kab. Bulukumba	40	8	9
337	Kab. Enrekang	30	10	9
338	Kab. Gowa	45	13	8
339	Kab. Jeneponto	40	12	17
340	Kab. Luwu	35	9	6
341	Kab. Luwu Utara	35	7	7
342	Kab. Maros	35	7	2
343	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	35	6	5
344	Kota Palopo	25	6	3
345	Kab. Luwu Timur	30	6	3
346	Kab. Pinrang	40	7	2
347	Kab. Sinjai	30	4	6
348	Kab. Kepulauan Selayar	25	15	12
349	Kab. Sidenreng Rappang	35	14	7
350	Kab. Soppeng	30	9	6
351	Kab. Takalar	30	12	11
352	Kab. Tana Toraja	30	9	10
353	Kab. Wajo	40	5	8
354	Kota Pare-Pare	25	10	6
355	Kota Makassar	50	9	6
356	Kab. Toraja Utara	35	6	3
357	Prov. Sulawesi Tenggara	45	9	7
358	Kab. Buton	35	6	5
359	Kab. Konawe	30	8	9
360	Kab. Kolaka	35	9	5
361	Kab. Muna	35	7	4

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
362	Kota Kendari	35	4	15
363	Kab. Konawe Selatan	35	9	6
364	Kab. Wakatobi	25	13	6
365	Kab. Kolaka Utara	35	3	4
366	Kab. Konawe Utara	20	11	10
367	Kab. Buton Utara	20	8	7
368	Kab. Bombana	25	9	11
369	Prov. Bali	55	5	4
370	Kab. Badung	40	9	6
371	Kab. Bangli	30	6	5
372	Kab. Buleleng	45	8	3
373	Kab. Jembrana	35	4	3
374	Kab. Karangasem	45	4	4
375	Kab. Klungkung	30	8	3
376	Kab. Tabanan	40	5	4
377	Kota Denpasar	45	11	6
378	Kab. Gianyar	40	6	4
379	Prov. Nusa Tenggara Barat	65	9	5
380	Kab. Bima	45	9	10
381	Kab. Lombok Barat	45	12	5
382	Kab. Lombok Tengah	50	5	1
383	Kab. Lombok Timur	50	8	9
384	Kab. Sumbawa	45	9	7
385	Kota Mataram	40	5	2
386	Kota Bima	25	10	4
387	Kab. Sumbawa Barat	25	7	4
388	Kab. Dompu	30	5	8
389	Kab. Lombok Utara	30	9	4
390	Prov. Nusa Tenggara Timur	65	6	12
391	Kab. Alor	30	5	11
392	Kab. Belu	40	10	6
393	Kab. Ende	30	6	7
394	Kab. Flores Timur	30	5	9
395	Kab. Manggarai	35	6	5
396	Kab. Ngada	25	7	11
397	Kab. Sumba Barat	25	8	3
398	Kab. Sumba Timur	30	5	4
399	Kab. Timor Tengah Selatan	40	9	6
400	Kab. Timor Tengah Utara	30	5	6
401	Kota Kupang	40	6	8
402	Kab. Rote Ndao	25	5	9
403	Kab. Manggarai Barat	30	7	16
404	Kab. Nagekeo	25	5	9
405	Kab. Sumba Barat Daya	35	12	6
406	Kab. Manggarai Timur	30	14	7
407	Kab. Sabu Raijua	20	9	15
408	Kab. Kupang	35	9	9
409	Kab. Lembata	25	9	5
410	Kab. Sikka	35	7	5
411	Kab. Sumba Tengah	20	5	6
412	Prov. Maluku	45	6	11
413	Kab. Maluku Tenggara Barat	25	10	9

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
414	Kab. Maluku Tengah	40	8	14
415	Kab. Buru	25	8	10
416	Kota Ambon	35	7	11
417	Kab. Seram Bagian Timur	25	8	11
418	Kab. Kepulauan Aru	25	11	4
419	Kota Tual	20	9	14
420	Kab. Maluku Barat Daya	20	8	8
421	Kab. Buru Selatan	20	17	18
422	Kab. Maluku Tenggara	25	5	7
423	Kab. Seram Bagian Barat	30	9	8
424	Prov. Papua	55	3	15
425	Kab. Biak Numfor	25	8	9
426	Kab. Jayapura	40	8	11
427	Kab. Merauke	50	9	6
428	Kab. Mimika	35	4	8
429	Kab. Nabire	25	9	8
430	Kab. Kepulauan Yapen	25	6	9
431	Kota Jayapura	40	3	11
432	Kab. Keerom	20	8	7
433	Kab. Pegunungan Bintang	25	9	8
434	Kab. Boven Digoel	20	7	9
435	Kab. Asmat	25	12	8
436	Kab. Waropen	20	9	9
437	Kab. Mamberamo Tengah	20	11	11
438	Kab. Yalimo	20	10	3
439	Kab. Dogiyai	20	12	3
440	Kab. Intan Jaya	20	8	6
441	Prov. Maluku Utara	45	7	8
442	Kab. Halmahera Tengah	20	3	3
443	Kota Ternate	30	7	1
444	Kab. Halmahera Barat	25	6	11
445	Kab. Halmahera Timur	20	5	7
446	Kab. Halmahera Selatan	30	6	4
447	Kab. Halmahera Utara	25	4	5
448	Kota Tidore Kepulauan	25	4	1
449	Kab. Pulau Morotai	20	5	12
450	Kab. Kepulauan Sula	25	3	8
451	Prov. Banten	85	14	7
452	Kab. Lebak	50	6	3
453	Kab. Pandeglang	50	10	12
454	Kab. Serang	50	8	15
455	Kab. Tangerang	50	15	12
456	Kota Cilegon	35	10	10
457	Kota Tangerang	50	11	4
458	Kota Serang	45	14	7
459	Kota Tangerang Selatan	50	9	5
460	Prov. Bangka Belitung	45	7	8
461	Kab. Bangka	35	6	5
462	Kab. Belitung	25	10	5
463	Kota Pangkal Pinang	30	11	6
464	Kab. Bangka Selatan	25	9	8
465	Kab. Bangka Tengah	25	8	13

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA DPRD	TEMUAN AUDIT LKPD TAHUN 2015	
		LEG (X <sub>3</sub> )	SPI (X <sub>4</sub> )	PATUH (X <sub>5</sub> )
466	Kab. Bangka Barat	25	8	6
467	Kab. Belitung Timur	25	7	14
468	Prov. Gorontalo	45	14	8
469	Kab. Boalemo	25	4	8
470	Kab. Gorontalo	35	5	6
471	Kota Gorontalo	25	16	6
472	Kab. Pohuwato	25	11	10
473	Kab. Bone Bolango	25	8	5
474	Kab. Gorontalo Utara	25	11	7
475	Prov. Kepulauan Riau	45	6	9
476	Kab. Natuna	20	5	5
477	Kab. Kepulauan Anambas	20	4	4
478	Kab. Karimun	30	5	5
479	Kota Batam	50	10	4
480	Kota Tanjung Pinang	30	4	8
481	Kab. Lingga	20	8	4
482	Kab. Bintan	25	9	4
483	Prov. Papua Barat	45	6	6
484	Kab. Fakfak	20	4	9
485	Kab. Manokwari	30	7	8
486	Kab. Sorong	25	5	3
487	Kota Sorong	30	8	7
488	Kab. Raja Ampat	20	8	3
489	Kab. Sorong Selatan	20	3	8
490	Kab. Teluk Bintuni	20	10	4
491	Kab. Teluk Wondama	20	7	4
492	Kab. Kaimana	25	5	2
493	Kab. Tambrauw	20	4	3
494	Kab. Maybrat	20	10	3
495	Prov. Sulawesi Barat	45	4	7
496	Kab. Majene	25	7	8
497	Kab. Mamuju	40	4	6
498	Kab. Polewali Mandar	45	6	5
499	Kab. Mamasa	30	12	13
500	Kab. Mamuju Utara	30	6	9
501	Prov. Kalimantan Utara	35	3	3
502	Kab. Bulungan	25	9	7
503	Kab. Malinau	20	4	5
504	Kab. Nunukan	25	4	6
505	Kota Tarakan	25	8	9
506	Kab. Tana Tidung	20	4	5

**LAMPIRAN 9**  
**PEMERINTAH DAERAH DENGAN JUMLAH ANGGOTA DPRD**  
**PALING SEDIKIT**

<b>No</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Anggota DPRD</b>
1	Kab. Simeulue	Aceh	20
2	Kota Sabang	Aceh	20
3	Kab. Gayo Lues	Aceh	20
4	Kab. Aceh Jaya	Aceh	20
5	Kota Subulussalam	Aceh	20
6	Kota Sibolga	Sumatera Utara	20
7	Kab. Pakpak Bharat	Sumatera Utara	20
8	Kab. Nias Barat	Sumatera Utara	20
9	Kab. Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	20
10	Kab. Solok	Sumatera Barat	20
11	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	20
12	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat	20
13	Kota Pariaman	Sumatera Barat	20
14	Kab. Sukamara	Kalimantan Tengah	20
15	Kab. Lamandau	Kalimantan Tengah	20
16	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	20
17	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara	20
18	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	20
19	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	20
20	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	20
21	Kab. Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	20
22	Kab. Buton Utara	Sulawesi Tenggara	20
23	Kab. Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	20
24	Kab. Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	20
25	Kota Tual	Maluku	20
26	Kab. Maluku Barat Daya	Maluku	20
27	Kab. Buru Selatan	Maluku	20
28	Kab. Keerom	Papua	20
29	Kab. Boven Digoel	Papua	20
30	Kab. Waropen	Papua	20
31	Kab. Mamberamo Tengah	Papua	20
32	Kab. Yalimo	Papua	20
33	Kab. Dogiyai	Papua	20
34	Kab. Intan Jaya	Papua	20
35	Kab. Halmahera Tengah	Maluku Utara	20
36	Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara	20
37	Kab. Pulau Morotai	Maluku Utara	20
38	Kab. Natuna	Kepulauan Riau	20
39	Kab. Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	20
40	Kab. Lingga	Kepulauan Riau	20
41	Kab. Fakfak	Papua Barat	20
42	Kab. Raja Ampat	Papua Barat	20
43	Kab. Sorong Selatan	Papua Barat	20
44	Kab. Teluk Bintuni	Papua Barat	20
45	Kab. Teluk Wondama	Papua Barat	20
46	Kab. Tambrau	Papua Barat	20
47	Kab. Maybrat	Papua Barat	20
48	Kab. Malinau	Kalimantan Utara	20
49	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	20

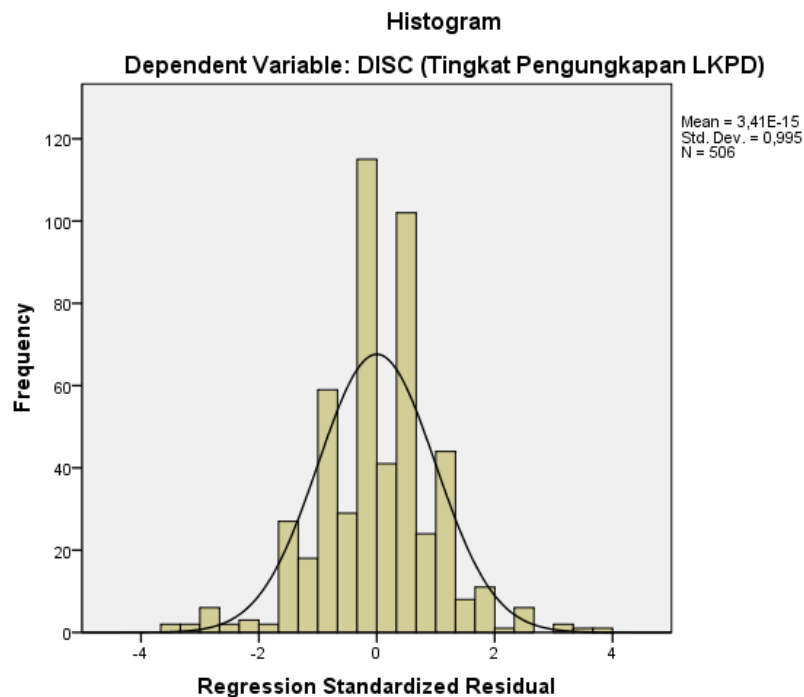


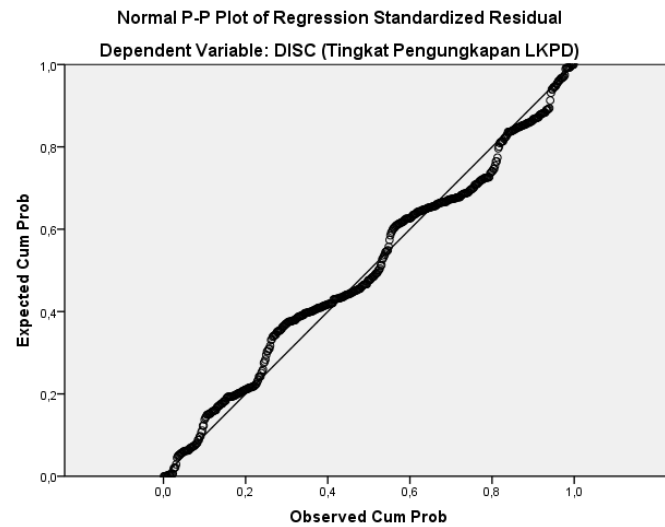
## LAMPIRAN 10 HASIL UJI DAN REGRESI

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ASET (Total Aset)	506	27.19	33.72	28.5562	.72903
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	506	22.54	31.24	25.5545	1.29472
LEG (Jumlah Anggota DPRD)	506	20	106	36,75	13,133
SPI (Jumlah temuan kelemahan SPI)	506	2	35	7,71	3,185
PATUH (Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan)	506	1	18	7,08	3,351
DISC (Tingkat Pengungkapan LKPD)	506	.2353	.5588	.391729	.0456867
Valid N (listwise)	506				

### 2. Uji Normalitas





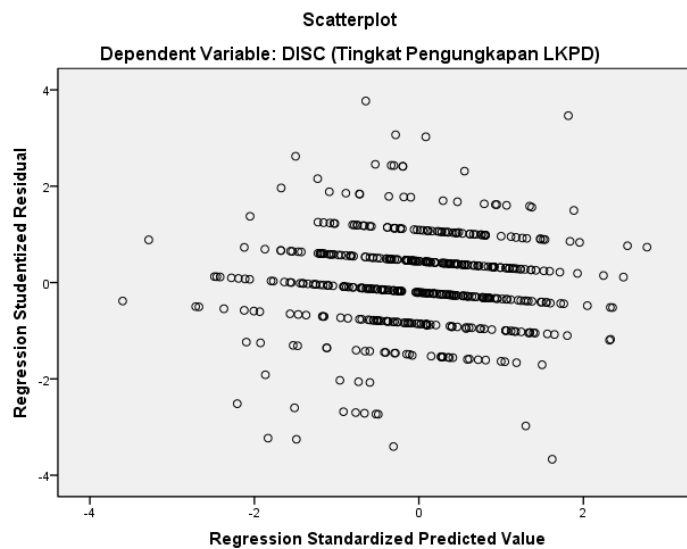
### 3. Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,452	,109		4,155	,000		
	ASET (Total Aset)	-,009	,005	-,141	-1,850	,065	,339	2,950
	PAD (Pendapatan Asli Daerah)	,007	,003	,211	2,279	,023	,230	4,345
	LEG (Jumlah Anggota DPRD)	,000	,000	-,035	-,446	,655	,314	3,189
	SPI (Jumlah temuan kelemahan SPI)	,000	,001	-,010	-,222	,824	,903	1,108
	PATUH (Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan)	,001	,001	,079	1,696	,090	,905	1,105

a. Dependent Variable: DISC (Tingkat Pengungkapan LKPD)

### 4. Uji Heterokedastisitas



## 5. Analisis Regresi Berganda

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PATUH (Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), PAD (Pendapatan Asli Daerah), SPI (Jumlah temuan kelemahan SPI), ASET (Total Aset), LEG (Jumlah Anggota DPRD) <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: DISC (Tingkat Pengungkapan LKPD)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,132 <sup>a</sup>	,017	,007	.0455151

a. Predictors: (Constant), PATUH (Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), PAD (Pendapatan Asli Daerah), SPI (Jumlah temuan kelemahan SPI), ASET (Total Aset), LEG (Jumlah Anggota DPRD)

b. Dependent Variable: DISC (Tingkat Pengungkapan LKPD)

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,018	5	,004	1,763	,119 <sup>a</sup>
	Residual	1,036	500	,002		
	Total	1,054	505			

a. Predictors: (Constant), PATUH (Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), PAD (Pendapatan Asli Daerah), SPI (Jumlah temuan kelemahan SPI), ASET (Total Aset), LEG (Jumlah Anggota DPRD)

b. Dependent Variable: DISC (Tingkat Pengungkapan LKPD)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,452	,109		4,155	,000
	ASET (Total Aset)	-,009	,005	-,141	-1,850	,065
	PAD (Pendapatan Asli Daerah)	,007	,003	,211	2,279	,023
	LEG (Jumlah Anggota DPRD)	,000	,000	-,035	-,446	,655
	SPI (Jumlah temuan kelemahan SPI)	,000	,001	-,010	-,222	,824
	PATUH (Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan)	,001	,001	,079	1,696	,090

a. Dependent Variable: DISC (Tingkat Pengungkapan LKPD)